



STRATEGI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KALIMANTAN BARAT 2024-2026





GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR: 1065 / DPPPA/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK PROVINSI
KALIMANTAN BARAT PERIODE 2024 - 2026

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak;
- b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melakukan pencegahan perkawinan anak, untuk itu perlu dibentuk Tim Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Kalimantan Barat Periode 2024 - 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka Pembentukan Tim Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Kalimantan Barat Periode 2024-2026, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Kalimantan Barat Periode 2024-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai fungsi :
- a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pencegahan perkawinan anak sebagaimana tercantum pada dokumen rencana aksi pencegahan perkawinan anak, baik secara berkala maupun insidental;
 - b. Melakukan sosialisasi/ diseminasi informasi tentang pencegahan perkawinan anak secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
 - c. Melaksanakan tugas dan fungsi dari masing-masing pihak sesuai dengan renstra/ renja dari masing-masing institusi dengan menjadikan tema pencegahan perkawinan anak sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan aksi pencegahan perkawinan anak;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

- KETIGA** : Tim Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Tim Pembina:
 1. Pengarah :
Bertanggung jawab terhadap pembinaan penyelenggaraan aksi pencegahan perkawinan anak;
 2. Penanggung Jawab:
Bertanggungjawab untuk menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor pelaksanaan aksi pencegahan perkawinan anak;
 3. Ketua:
 - a) Mengkoordinasikan perencanaan kebijakan dan pelaksanaan aksi pencegahan perkawinan anak dari masing-masing institusi;
 - b) Melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan aksi pencegahan perkawinan anak;
 4. Wakil Ketua:
Bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan penganggaran kebijakan program dan kegiatan pembangunan anak di setiap Perangkat Daerah;
 5. Sekretaris:
 - a) Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
 - b) Mempersiapkan data dan informasi yang mendukung pelaksanaan tugas ketua;
 - b. Tim Pelaksana I: Optimalisasi Kapasitas Anak
 1. Koordinator:
Bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan aksi yang mendorong peningkatan kapasitas/ kualitas anak;
 2. Anggota:
 - a) Mendorong keterlibatan aktif pemuda/ remaja dalam program-program pemerintah;
 - b) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan;
 - c) Meningkatkan kesadaran pemuda/ remaja tentang tantangan dan peluang lingkungan terhadap pertumbuhan pemuda/ remaja;
 - d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - c. Tim Pelaksana II: Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak
 1. Koordinator:
Bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang menciptakan/ membangun lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak;
 2. Anggota:
 - a) Melaksanakan kampanye/ promosi kesetaraan hak-hak perempuan dan pencegahan perkawinan anak;
 - b) Memperkuat kualitas pembelajaran;
 - c) Mendorong peran orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku anak;
 - d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi;

- d. Tim Pelaksana III: Aksesibilitas dan Perluasan Layanan
 1. Koordinator:
Bertanggungjawab untuk Mengkoordinasikan kegiatan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan hak anak;
 2. Anggota:
 - a) Melakukan advokasi dengan tujuan memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- e. Tim Pelaksana IV: Penguatan Regulasi dan Kelembagaan
 1. Koordinator:
Bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan kegiatan yang mendorong adanya regulasi/ penguatan regulasi yang ada, dan/ atau memperkuat perangkat kelembagaan perangkat daerah terkait;
 2. Anggota:
 - a) Memperkuat instrumen/ perangkat pendukung (kebijakan dan perangkat lainnya) ditingkat daerah tentang perlindungan anak dan perempuan;
 - b) Melaksanakan Integrasi Data Perkawinan Anak;
 - c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- f. Tim Pelaksana V: Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan
 1. Koordinator:
Bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan kegiatan yang membangun/meningkatkan sinergitas antar aktor dalam pencegahan perkawinan anak;
 2. Anggota:
 - a) Membangun/ Memperkuat Jaringan Kerja;
 - b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 9 Agustus 2023

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Bupati/ Walikota se-Kalimantan Barat;
7. Anggota Tim Pencegahan Perkawinan Anak.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 1065 /DPPA/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2024 – 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	TIM PEMBINA	
1.	Gubernur Kalimantan Barat	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesjahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat	Penanggungjawab
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Wakil Ketua
6.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris
B	TIM PELAKSANA I Optimalisasi Kapasitas Anak	
1.	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Koordinator
2.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
3.	Uskup Agung Pontianak	Anggota
4.	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
6.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
7.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
8.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
9.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang	Anggota

11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang	Anggota
12.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang	Anggota
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas	Anggota
14.	Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang	Anggota
15.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi	Anggota
16.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi	Anggota
17.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
18.	Kepala Bidang Pendidikan Pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
19.	Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
20.	Kepala Bidang Pendidikan Urusan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
21.	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
22.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
23.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
24.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Ketapang	Anggota
25.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Ketapang	Anggota
26.	Ketua Forum Generasi Berencana (Genre) Kabupaten Ketapang	Anggota
27.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Sintang	Anggota
28.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang	Anggota

C.	Tim Pelaksana II Lingkungan Yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak	
1.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Koordinator
2.	Uskup Sintang	Anggota
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
4.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas	Anggota
8.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas	Anggota
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi	Anggota
12.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Melawi	Anggota
13.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi	Anggota
14.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang	Anggota
15.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang	Anggota
16.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang	Anggota
17.	Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang	Anggota
18.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang	Anggota
19.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang	Anggota
20.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang	Anggota

21.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi	Anggota
22.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang	Anggota
23.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang	Anggota
24.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ketapang	Anggota
25.	Kepala Bidang Pembangunan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
26.	Kepala Bidang Olah Raga pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
27.	Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sintang	Anggota
28.	Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Melawi	Anggota
29.	Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
30.	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
31.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
32.	Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Madya (Ketua Kelompok Kerja Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga) pada BKKBN Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
33.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Sintang	Anggota
34.	Pimpinan Aisyah Kabupaten Sintang	Anggota
35.	Ketua Forum Anak Kabupaten Sintang	Anggota
36.	Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Melawi	Anggota
37.	Ketua Wahana Visi Indonesia Kabupaten Melawi	Anggota
38.	Ketua Forum Anak Kabupaten Melawi	Anggota
39.	Ketua Forum Generasi Berencana (Genre) Kabupaten Ketapang	Anggota

40.	Ketua Forum Anak Kabupaten Ketapang	Anggota
41.	Ketua Forum Anak Kabupaten Sambas	Anggota
D.	TIM PELAKSANA III Akseibilitas dan Perluasan Layanan	
1.	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Koordinator
2.	Uskup Ketapang	Anggota
3.	Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
4.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
5.	Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang	Anggota
6.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi	Anggota
7.	Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ketapang	Anggota
8.	Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
9.	Kepala Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
10.	Kepala Bidang Pembinaan SMK Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
11.	Kepala Bidang Pembinaan SMA Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
12.	Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Madya (Ketua Kelompok Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi) pada BKKBN Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
13.	Panitera Muda Hukum Permohonan pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak	Anggota
14.	Ketua Forum Anak Kabupaten Ketapang	Anggota

E.	TIM PELAKSANA IV Penguatan Regulasi dan Kelembagaan	
1.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Koordinator
2.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
3.	Sekretaris Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
5.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Sambas	Anggota
6.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Melawi	Anggota
7.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Sintang	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang	Anggota
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang	Anggota
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi	Anggota
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi	Anggota
12.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas	Anggota
13.	Ketua Pengadilan Agama Sambas	Anggota
14.	Ketua Pengadilan Agama Sintang	Anggota
15.	Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh	Anggota
16.	Ketua Pengadilan Agama Ketapang	Anggota
17.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
18.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
19.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
20.	Kepala Bidang Kelembagaan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota

21.	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas	Anggota
22.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas	Anggota
23.	Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Sambas	Anggota
24.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang	Anggota
25.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sambas	Anggota
26.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sintang	Anggota
27.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Melawi	Anggota
28.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang	Anggota
29.	Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Madya (Ketua Kelompok Kerja Advokasi Penggerakan dan Informasi) pada BKKBN Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
F.	TIM PELAKSANA V Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan	
1.	Kepala Bidang Data Gender Dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Koordinator
2.	Ketua KPPAD Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
3.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura Pontianak	Anggota
4.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Panca Bhakti Pontianak	Anggota
5.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pontianak	Anggota
6.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Pontianak	Anggota
7.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Pontianak	Anggota
8.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IKIP Pontianak	Anggota
9.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Sambas (Poltesa)	Anggota

10.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sambas	Anggota
11.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Melawi	Anggota
12.	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintah, Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Melawi	Anggota
13.	Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang	Anggota
14.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
15.	Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas	Anggota
16.	Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang	Anggota
17.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi	Anggota
18.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Sintang	Anggota
19.	Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Sambas	Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

KOMITMEN BERSAMA

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KALIMANTAN BARAT

Dalam rangka pencegahan perkawinan anak sebagai upaya meningkatkan pencapaian pembangunan di Kalimantan Barat, maka dengan ini kami berkomitmen untuk secara konsisten mengimplementasikan Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, 26 Juni 2023

Yang Bertanda Tangan,

BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat


.....
SELLA, S.P.

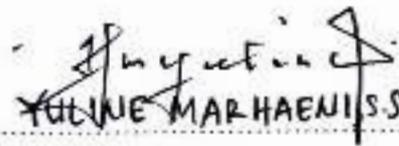
BAPPEDA Kabupaten Sambas


.....
Rissa Mifturianti, S.P.ME

BAPPEDA Kabupaten Ketapang


.....
DRS. AMINOLLAH, M.Si

Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat


.....
YULINE MARHAENI, S.Sos, M.Si

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas


.....
Widi Astuti, S.Tr. Gz

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Ketapang

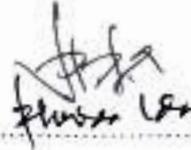

.....
INTARTI, SE

BAPPEDA Kabupaten Sintang



LEA Agni S.

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sintang



LEA

BAPPEDA Kabupaten Melawi



Enkir M.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Melawi



O. Mingsch.

Mengetahui,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT.



dr. HARISSON, M. Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19660808 199803 1 007

Sambutan Gubernur

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dengan telah diselesaikannya Buku Dokumen Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Di Kalimantan Barat. Dalam proses penyusunannya, saya menyambut baik Sinergi yang telah dilaksanakan oleh USAID-ERAT dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai suatu upaya mengatasi tingginya angka perkawinan anak di Kalimantan Barat.

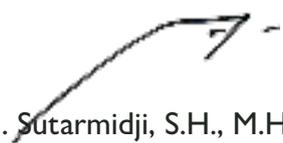
Tingginya angka perkawinan anak, kita ketahui bahwa permasalahannya sangat kompleks. Fenomena ini hampir merata terjadi di negara kita Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat mulai dari pemetaan masalah, mencari akar masalah, rencana intervensi hingga pendekatan yang perlu dilakukan, dan kemudian merumuskan strateginya dalam bentuk rencana aksi berkelanjutan.

Rencana aksi yang telah dituangkan dalam Dokumen Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Kalimantan Barat, harapan saya akan membantu perangkat daerah untuk menginternalisasi dalam rencana kerja menjadi rujukan konkrit inovasi pelayanan publik di lapangan. Ruang pelayanan akan menjadi maksimal apabila dilaksanakan secara kolaboratif antar stakeholders sesuai dengan peran dan fungsinya. Saya percaya bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat tidaknya hanya diukur dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, akan tetapi lebih dari itu, yaitu aspek moralitas para kaum muda sebagai penerus estafet pembangunan dan aset terbesar yang dimiliki oleh bangsa kita.

Praktek baik yang telah dilaksanakan di Kabupaten, dimana lokus penelitian dilaksanakan, saya berharap dapat diadopsi oleh Kabupaten/Kota yang lain untuk pencegahan dan mengatasi persoalan perkawinan anak. Untuk itu saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun atas dedikasi yang telah diberikan, sehingga dokumen ini dapat diselesaikan dan menjadi bagian pencapaian saya dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang beriman, sehat, cerdas dan aman.

Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada USAID ERAT yang telah berkontribusi dalam mendukung penyusunan Buku Dokumen Strategi Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Di Kalimantan Barat. Dukungan USAID ERAT ini merupakan bentuk kolaborasi dan kerja sama para pihak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, Juni 2023
Gubernur Kalimantan Barat



H. Sutarmidji, S.H., M.Hum

Tim Penyusun

Linda Purnama
Yuline Marhaeni
Claudia Ani
Mas Henny Dewi Sartika
Sella Ursulla
Firdaus
Hasymi Rinaldi
Aris Munandar
Fatma Aghistni
Rissa Nisfurianti
Oka Indriastuty
Intarti
Florida Ida
Rumiris R Nainggolan
Olan Ningsih

Terima kasih kepada Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang turut membantu: Bappeda Provinsi Kalimantan Barat , DPMDes Provinsi Kalimantan Barat ,Kemenag Kanwil Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat, BKKBN Provinsi Kalimantan Barat , Kantor Pengadilan Tinggi Agama Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dan Disdukcapil Provinsi Kalimantan Barat.

Editor

Natalia Warat
Vindya Budiman

Daftar Isi

SK Gubernur	i
Komitmen Bersama	xiii
Sambutan Gubernur	xv
Tim Penyusun	xvi
Daftar Isi	xvii
Daftar Grafik	xviii
Daftar Tabel	xviii
Daftar Diagram	xviii
BAB 1. Pendahuluan	I
1.1 Latar Belakang	I
1.2 Tujuan	I
1.3 Dasar Hukum	I
BAB 2. Perkawinan Anak di Kalimantan Barat	3
2.1 Fenomena Perkawinan Anak Di Kalimantan Barat	3
2.2 Ancaman Perkawinan Anak Terhadap Pembangunan Daerah	4
BAB 3. Strategi Pencegahan Perkawinan Anak	9
3.1 Identifikasi Masalah dan Sumber Masalah	9
3.2 Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak	11
3.3 Relasi Strategi Nasional dan Strategi Daerah	12
3.4 Target Aksi Pencegahan Perkawinan Anak	13
BAB 4. Aktor dan Aksi	15
4.1 Strategi dan Aktor	15
4.2 Sinergitas Aksi	20
4.3 Kemitraan Strategis (Swasta dan Organisasi Non Pemerintah Lainnya)	41
BAB 5. Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan	43
BAB 6. Monitoring dan Evaluasi	71
BAB 7. Penutup	72

Daftar Grafik

Grafik 1. Persentase Perkawinan Anak per Kabupaten di Kalbar	2
Grafik 2. Perkawinan Anak berdasarkan Jenis Kelamin	3
Grafik 3. Perkawinan Anak 2011-2020 di Kalimantan Barat	3
Grafik 4. Skor IPM dan Presentase Perkawinan Anak 2021	4
Grafik 5. Indeks Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Perkawinan Anak 2021	5
Grafik 6. Relasi Perkawinan Anak dan Terbatasnya Kesempatan Bekerja	6
Grafik 7. Persentase Perkawinan Usia 19 Tahun Kebawah 2011-2026 di Kalimantan Barat	11
Grafik 8. Target Penurunan Angka Perkawinan Anak 2024-2026	12

Daftar Tabel

Tabel 1. Relasi Strategi Nasional dan Strategi Daerah	10
Tabel 2. Aktor dan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak	13
Tabel 3. Sinergitas Aksi Pencegahan Perkawinan Anak	18
Tabel 4. Komitmen Lembaga Non Pemerintah dalam Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak	39

Daftar Diagram

Diagram 1. Siklus Masalah Perkawinan Anak di Kalimantan Barat	4
Diagram 2. Masalah dan Sumber Masalah Perkawinan Anak	8
Diagram 3. Strategi Daerah dan Masalah Penyebab Perkawinan Anak di Kalimantan Barat	9

BAB I.

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Angka perkawinan anak di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) cukup mengkhawatirkan. Di tingkat nasional, berdasarkan data BPS 2021, angka perkawinan anak di Kalbar berada pada peringkat lima besar pada 2021. Bahkan, ditahun 2020, Kalbar justru berada pada peringkat dua tertinggi setelah Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun ditahun 2021 terjadi penurunan angka perkawinan anak, namun Kalbar masih pada posisi lima tertinggi se-Indonesia.

Mengacu pada tingginya angka perkawinan anak di Kalimantan Barat, diperlukan langkah strategis, sistematis, dan sinergis dari para pihak terkait. Keberadaan dokumen rencana aksi pencegahan perkawinan anak menjadi penting sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang sistematis dari masing-masing institusi strategis, baik pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten), organisasi masyarakat sipil (OMS), dan juga swasta. Masing-masing institusi yang terlibat dalam penyusunan ini berkomitmen untuk bekerja secara sinergis dalam melakukan pencegahan perkawinan anak. Pada tingkat pemerintah daerah, rangkaian aksi pada dokumen ini tercantum dalam rencana strategis dan juga rencana kerja dimasing-masing perangkat daerah terkait.

Dalam penyusunannya, rencana aksi bersifat partisipatif, serta mengacu pada referensi kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Rencana aksi disusun secara terarah dan memiliki integrasi yang baik, terukur, terencana, dan tepat sasaran. Keberadaan Rencana Aksi ini nantinya juga akan menjadi panduan bagi para pihak dalam rangka mengimplementasikan program dan kegiatannya.

Dokumen rencana aksi ini memungkinkan untuk disempurnakan kembali mengingat adanya kemungkinan strategi potensial dan aktor-aktor lain yang berkomitmen dalam pencegahan perkawinan anak namun belum terakomodir melalui dokumen ini.

1.2 Tujuan

Penyusunan rencana aksi ini bertujuan sebagai:

1. Panduan bagi para pihak terkait untuk penanganan pencegahan perkawinan anak;
2. Panduan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan terkait pencegahan perkawinan anak Kalbar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada setiap tahapan pembangunan daerah;
3. Bahan masukan bagi Pemerintah Pusat dalam mensinergikan program dan kegiatan Kementerian/LPNK terkait pencegahan perkawinan anak di Kalimantan Barat.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
8. 8. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 119);

BAB 2.

Perkawinan Anak di Kalimantan Barat

Perwujudan visi gubernur Kalbar, sebagaimana tercantum pada RPJMD Perubahan 2018-2023, adalah **Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat** Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa muara pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat melalui beragam strategi pemerintah. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang tercantum pada visi tersebut hanya merupakan perangkat yang dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Bahkan, target pembangunan dengan mengedepankan kualitas manusia pun telah menjadi visi dari pemerintahan sebelumnya. Pada RPJMD 2013-2018, visi pembangunan adalah **Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera**. Bukan hanya di Kalimantan Barat, bahkan sebagian besar visi pembangunan di daerah lainnya pun secara eksplisit mengedepankan pembangunan manusia sebagai sasaran utama pembangunan.

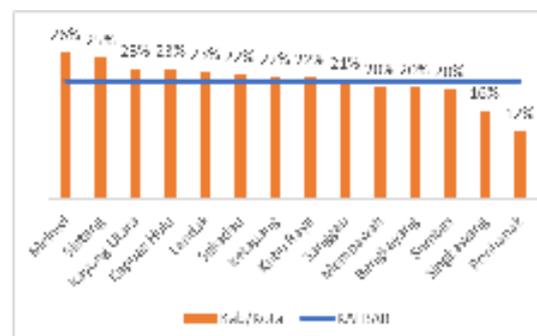
Permasalahannya, dalam konteks memperbaiki kualitas hidup manusia, wacana tentang perkawinan anak seringkali terabaikan. Padahal hampir seluruh riset yang melakukan kajian terhadap perkawinan anak menyepakati bahwa perkawinan anak bukanlah merupakan variabel bebas, melainkan terikat dengan banyak variabel lainnya. Keberadaan perkawinan anak dapat mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh kemiskinan, pendidikan, sosial, bahkan berdampak pada pula sektor kesehatan seperti kematian ibu dan bayi, dan juga faktor psikologis yang dapat berakibat pada meningkatnya angka KDRT (Djamilah & Kartikawati, 2014) (Eleanora & Sari, 2020) (Jamilah & Raudlatun, 2019) (Eleanora, Putri, & Saputra, 2021). Setidaknya, beragam riset

tersebut dapat dijadikan rujukan tentang perlunya mempertimbangkan isu perkawinan anak sebagai instrumen yang mempengaruhi pembangunan daerah.

2.1 Fenomena Perkawinan Anak Di Kalimantan Barat

Berdasarkan BPS 2021¹, **Angka perkawinan anak di Kalimantan Barat berada pada urutan 5 dari 34 Provinsi di Indonesia**. Bahkan, berdasarkan hasil susenas (Maret 2021) yang dilakukan BPS menunjukkan bahwa dari seluruh masyarakat Kalimantan Barat yang telah melakukan pernikahan, 21% diantaranya menikah dibawah usia 19 tahun. Dari 14 kabupaten/ kota yang ada di Kalimantan Barat, setidaknya terdapat 8 kabupaten yang berada diatas rata-rata provinsi (lebih dari 21%), dengan persentase tertinggi adalah kabupaten melawi, yaitu sebesar 26%.

Grafik 1. Persentase Perkawinan Anak per Kabupaten di Kalbar

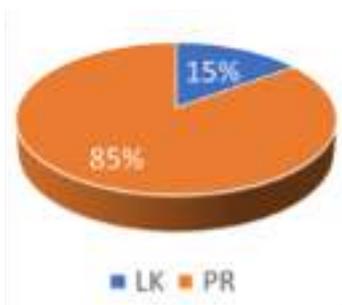


Sumber: Data olahan Susenas, Maret 2021

¹ Dikutip dari slide Rohika Kurniadi Sari, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan Dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. URGENSI KEBIJAKAN DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK, Disampaikan pada Acara Mini Lokakarya Pencegahan Perkawinan Anak di Pontianak, 20 Oktober 2022

Jika dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, perkawinan anak terbanyak dilakukan oleh perempuan, yaitu sebanyak 85% jika dibandingkan dengan laki-laki. Dalam hal ini, peluang perempuan untuk menikah dibawah usia 19 tahun sebanyak 5 hingga 6 kali dari laki-laki untuk menikah dibawah usia 19 tahun. Keberadaan perempuan cukup rentan dalam perkawinan anak. Rentannya perempuan dalam perkawinan anak dipengaruhi banyak faktor, semisal kultur yang diskriminatif terhadap keberadaan perempuan, seperti pengistilahan perawan tua, dan anggapan peran perempuan dalam rumah tangga, yang berakibat pada terbatasnya peluang perempuan untuk melanjutkan pendidikan (Djamilah & Kartikawati, 2014) (Eleanora & Sari, 2020) (Eleanora, Putri, & Saputra, 2021).

Grafik 2. Perkawinan Anak berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: data olahan Susenas, Maret 2021

Bahkan, rentannya praktik perkawinan anak di Kalimantan Barat sesungguhnya cukup masif. Data hasil susenas menunjukkan bahwa penduduk yang berusia 20-24 tahun ketika survey dilakukan (2021), hampir separuhnya menikah dibawah usia 19 tahun. Setidaknya sebanyak 46% penduduk yang

telah menikah, dan ketika ditahun 2021 berusia 20-24 tahun, melakukan perkawinan dibawah usia 19 tahun.

Grafik 3. Perkawinan Anak 2011-2020 di Kalimantan Barat



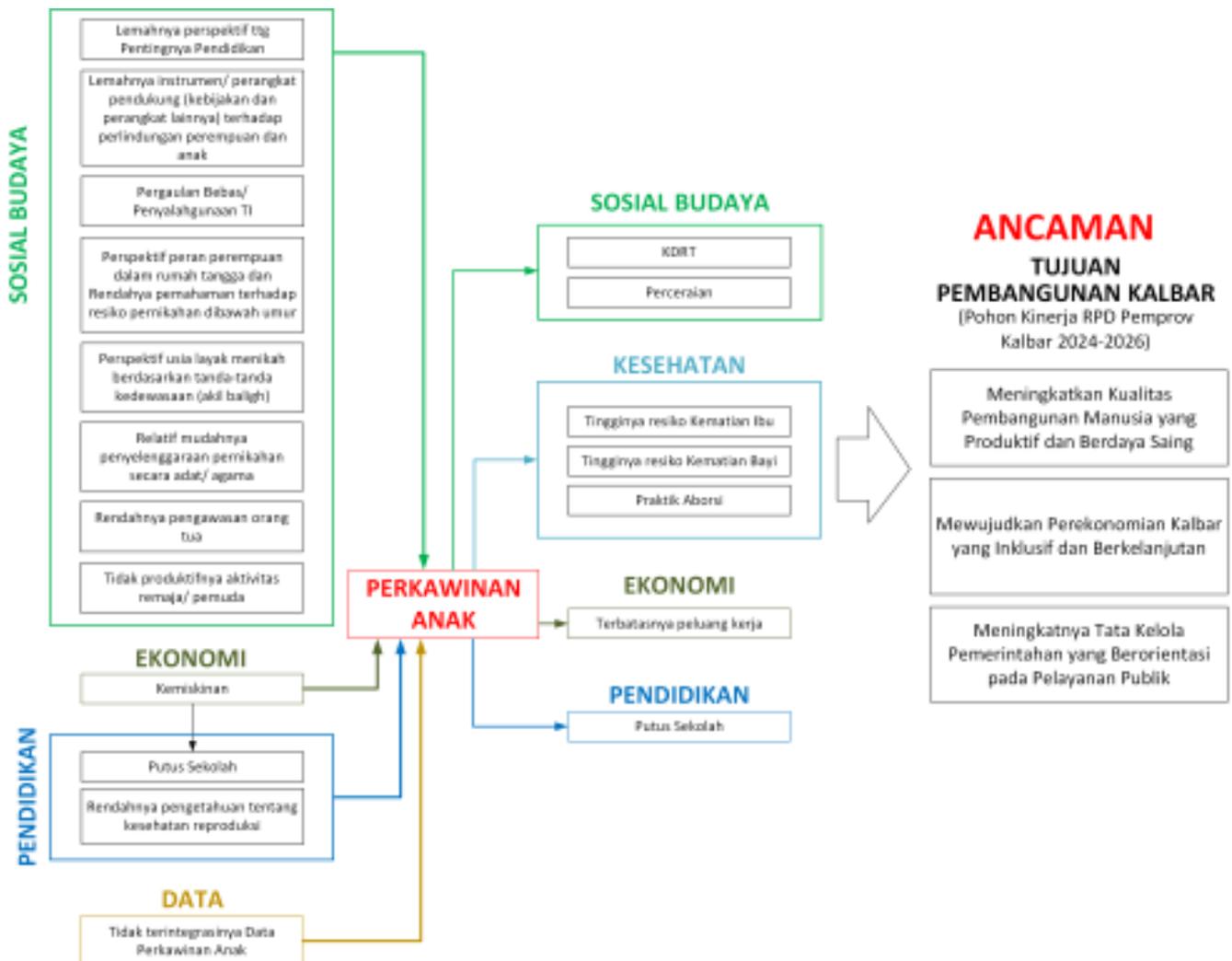
Sumber: Data olahan Susenas, Maret 2021

Trend perkawinan anak di Kalimantan Barat pada 10 tahun terakhir (2011-2020) tidak menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan. Berdasarkan data susenas 2021, ketika dikelompokkan tahun menikah terhadap penduduk yang telah menikah ditahun yang sama, menunjukkan adanya kecenderungan stagnasi persentase penduduk yang melakukan perkawinan diusia kurang dari 19 tahun. Sejak 2011 hingga 2020, kisaran persentase penduduk yang melakukan perkawinan pada usia dibawah 19 tahun berkisar dari 14%-18%. Kondisi yang ditampilkan pada grafik 4 mengindikasikan bahwa pada 10 tahun terakhir tidak adanya tindakan terhadap keadaan perkawinan anak di Kalimantan Barat, bahkan jika seandainya ada pun, tindakan tersebut tidak berdampak signifikan.

2.2 Ancaman Perkawinan Anak Terhadap Pembangunan Daerah

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa perkawinan anak merupakan variabel terikat, yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi variabel lainnya. Sebagaimana ditampilkan pada Diagram 1 dapat terlihat bahwa setidaknya teridentifikasi 4 sektor dominan yang mengakibatkan perkawinan anak, yaitu kondisi sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan. Bahkan maraknya perkawinan anak, selain disebabkan oleh ketiga sektor tersebut, pun mengakibatkan/ memperparah masalah pada empat sektor penyebab tersebut. Selain keempat sektor yang mendorong perkawinan anak, keberadaan perkawinan anak pun mengakibatkan masalah pada sektor kesehatan, seperti angka kematian ibu dan bayi, serta bayi lahir dengan berat rendah. Pembiaran terhadap fenomena perkawinan anak di Kalimantan Barat berpengaruh pada terhambatnya pertumbuhan daerah.

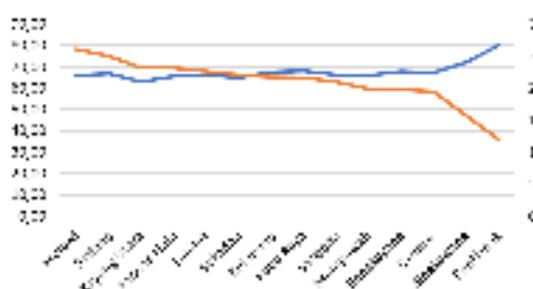
Diagram 1. Siklus Masalah Perkawinan Anak di Kalimantan Barat



Menariknya, jika grafik perkawinan anak di-overlay dengan skor IPM per kabupaten/kota di Kalimantan Barat **terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi perkawinan anak di suatu daerah, maka semakin rendah skor IPM yang dimiliki daerah tersebut.**

Kondisi yang ditampilkan pada grafik 4 mengindikasikan bahwa maraknya perkawinan anak di Kalimantan Barat berakibat pada rendahnya kualitas manusia di Kalimantan Barat. Terdapat kecenderungan hubungan berbanding terbalik antara IPM dan Perkawinan Anak. Semakin tinggi skor IPM, maka adanya kecenderungan semakin rendah tingkat perkawinan anak pada daerah tersebut, dan juga sebaliknya

Grafik 4. Skor IPM dan Presentase Perkawinan Anak 2021



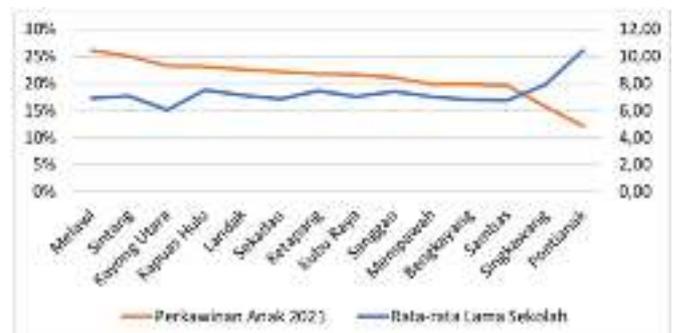
Fenomena tersebut cukup logis mengingat bahwa skor IPM dibentuk berdasarkan kualitas pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakatnya. Ketika pada grafik 4 menunjukkan adanya relasi antara sektor pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan sebagai variabel yang mempengaruhi (dan dipengaruhi oleh) perkawinan anak, maka tinggi rendahnya IPM berdampak pula pada tinggi rendahnya perkawinan anak.

DISEKTOR PENDIDIKAN, data yang diperoleh menunjukkan adanya potensi putus sekolah yang tinggi diakibatkan perkawinan anak. Hasil *overlay* data angka putus sekolah² dengan kelompok usia pernikahan penduduk³ menunjukkan bahwa adanya potensi putus sekolah yang tinggi pada tingkat SMA. Dari seluruh penduduk yang menikah dibawah usia 19 tahun, sebanyak 66% (atau sebanyak 14.479 responden) menikah diusia 16-18 tahun, dan hanya sebanyak 2% yang menikah dibawah usia 13 tahun.

Sedangkan angka putus sekolah⁴ (tidak menyelesaikan pendidikan hingga SMA), tertinggi hanya memiliki ijazah setara SD, ataupun (mungkin) melanjutkan SMP namun tidak selesai, yaitu sebanyak 43% (5.962 responden dari total responden yang putus sekolah. Sebanyak 25% (3.441 responden dari total responden yang putus sekolah) hanya mengantongi ijazah SMP, atau (mungkin) melanjutkan hingga SMA namun tidak selesai.

Fenomena tersebut didukung pula dengan hasil *overlay* indeks rata-rata lama sekolah dengan angka perkawinan anak per kabupaten. Kondisi yang ditampilkan pada grafik 5 menyerupai kondisi pada grafik 4, dimana ada kecenderungan berbanding terbalik antara rata-rata lama sekolah dengan perkawinan anak per kabupaten.

Grafik 5. Indeks Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Perkawinan Anak 2021



Gambaran diatas mengindikasikan bahwa perkawinan anak memiliki pengaruh terhadap rendahnya kualitas pendidikan masyarakat. Risiko putus sekolah akibat perkawinan yang dilakukan pelajar berakibat pada banyak hal, salah satu keluaran langsungnya adalah rendahnya indeks rata-rata lama sekolah. Disamping itu, kondisi tersebut mengakibatkan efek domino, bukan hanya berakibat pada pelaku perkawinan anak, namun juga bagi pertumbuhan pembangunan daerah.

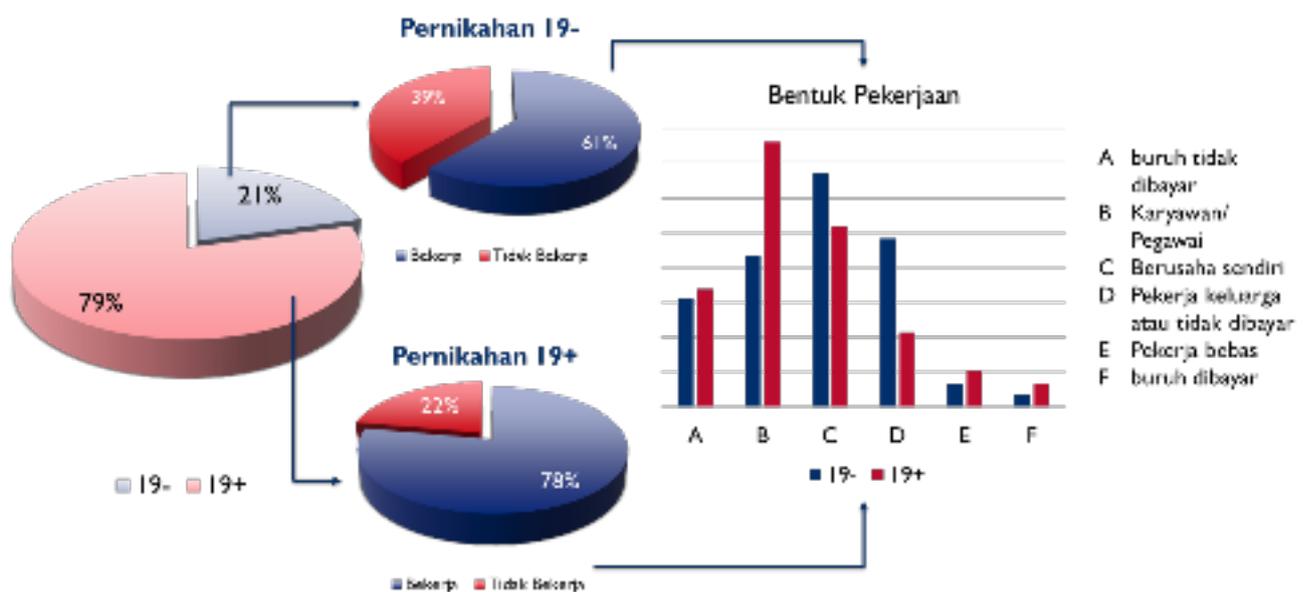
² Dilihat berdasarkan status pernah sekolah dengan ijazah tertinggi yang dimiliki

³ Dikelompokkan menjadi (1) dibawah 13 tahun/ menikah dimasa pendidikan dasar, (2) 13-16 tahun/ menikah dimasa pendidikan menengah pertama, (3) 16-18 tahun/ menikah dimasa pendidikan menengah atas

⁴ Responden yang pernah bersekolah dan tidak lagi/ sedang melanjutkan sekolah

DISEKTOR EKONOMI, sebagaimana yang ditampilkan pada diagram 1 sebelumnya, menunjukkan bahwa **Perkawinan Anak dapat disebabkan oleh kemiskinan**. Ironisnya, Perkawinan Anak pun memperparah kondisi kemiskinan yang telah terbentuk sebelumnya.

Grafik 6. Relasi Perkawinan Anak dan Terbatasnya Kesempatan Bekerja



Pada grafik 6 di atas dapat terlihat bahwa meskipun jumlah masyarakat pada angkatan kerja yang bekerja lebih tinggi dibandingkan tidak bekerja, baik menikah di atas ataupun dibawah 19 tahun, namun kesempatan bekerja tetap lebih tinggi bagi yang menikah di atas 19 tahun, dibandingkan dengan yang menikah dibawah 19 tahun lebih kecil. Kemudian pada bentuk pekerjaan, bagi yang menikah di atas 19 tahun lebih berpeluang untuk diterima sebagai karyawan/ pegawai, dibandingkan dengan yang menikah dibawah 19 tahun. Peluang kerja bagi yang menikah dibawah 19 tahun lebih banyak berusaha sendiri.

Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya kecenderungan bagi industri/ perusahaan lebih membuka peluang kerja lebih luas terhadap yang menikah di atas 19 tahun, dibandingkan dengan yang menikah dibawah 19 tahun. Hal lain yang dapat diambil adalah peluang kerja dengan cara berusaha sendiri dapat dilakukan oleh tiap rumah tangga, namun bagi yang menikah di atas 19 tahun lebih berpeluang memperoleh pekerjaan dibandingkan dengan yang menikah dibawah 19 tahun.

BAB 3.

Strategi Pencegahan Perkawinan Anak

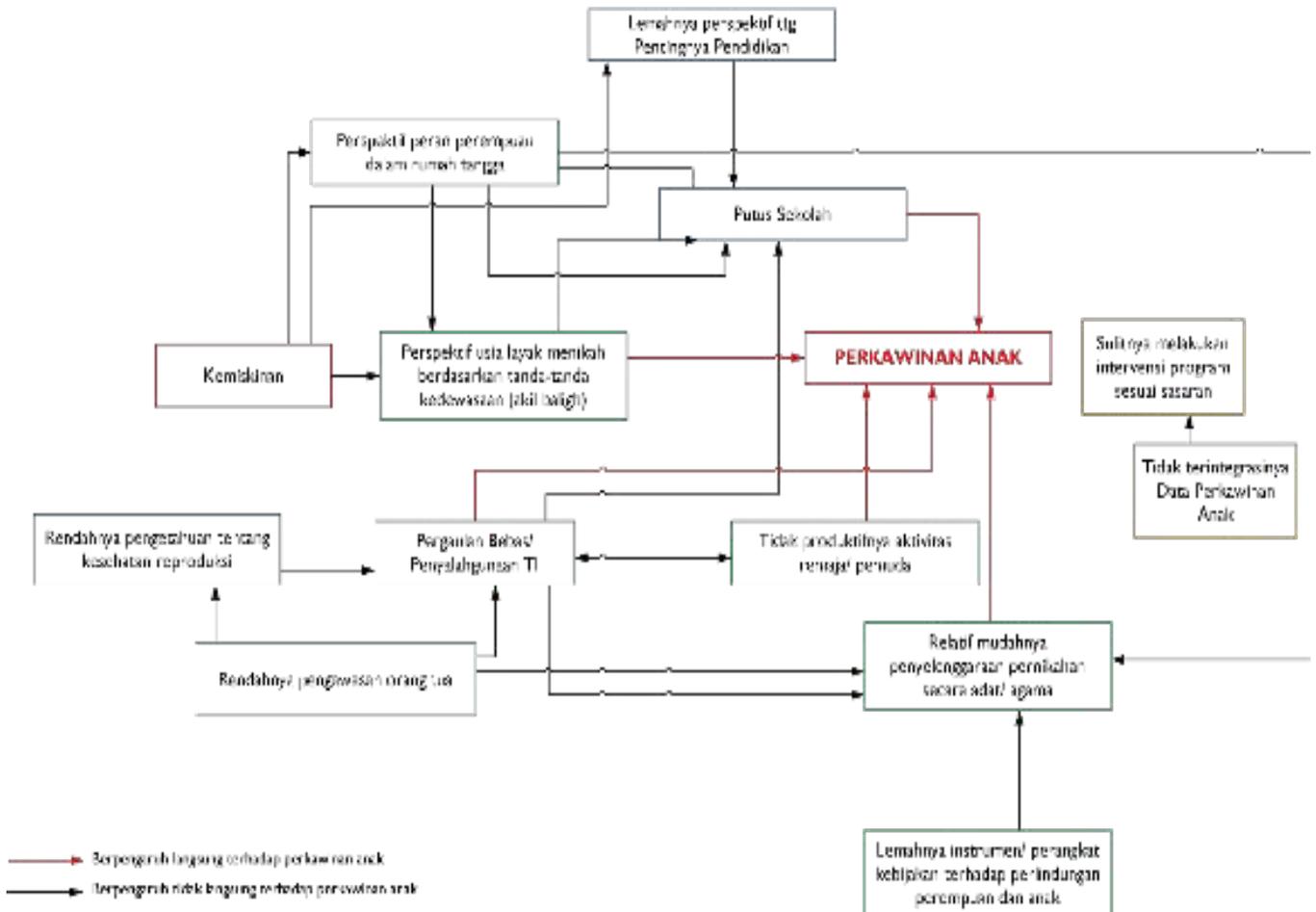
3.1 Identifikasi Masalah dan Akar Masalah

Sebagaimana dijelaskan pada bagian B diatas, dapat terlihat bahwa keberadaan perkawinan anak di Kalimantan Barat cukup mengkhawatirkan. Di samping itu, Perkawinan Anak yang terjadi dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh banyak hal sebagaimana yang ditampilkan pada diagram I sebelumnya. Setidaknya terdapat 4 (empat) dimensi yang mendorong timbulnya perkawinan anak, yaitu;

1. Sosial Budaya, dimana perkawinan anak didorong oleh;
 - a. Lemahnya perspektif ttg Pentingnya Pendidikan
 - b. Lemahnya instrumen/ perangkat pendukung (kebijakan dan perangkat lainnya) terhadap perlindungan perempuan dan anak
 - c. Pergaulan Bebas/ Penyalahgunaan TI
 - d. Perspektif peran perempuan dalam rumah tangga dan Rendahnya pemahaman terhadap resiko pernikahan dibawah umur
 - e. Perspektif usia layak menikah berdasarkan tanda-tanda kedewasaan (akil baligh)
 - f. Relatif mudahnya penyelenggaraan pernikahan secara adat/ agama
 - g. Rendahnya pengawasan orang tua
 - h. Tidak produktifnya aktivitas remaja/ pemuda
2. Ekonomi/kemiskinan;
3. Pendidikan, diantaranya;
 - a. Putus sekolah, dan
 - b. Rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi
4. Data
Tidak terintegrasinya data perkawinan anak berakibat pada sulitnya melakukan intervensi program dalam pencegahan perkawinan anak

Relasi antar dimensi tersebut sehingga dapat mendorong tingginya angka perkawinan anak dapat dilihat pada grafik berikut:

Diagram 2. Masalah dan Sumber Masalah Perkawinan Anak



Sebagaimana ditampilkan pada Diagram 2, keseluruhan masalah yang teridentifikasi tidak secara langsung mendorong adanya perkawinan anak. Teridentifikasi sebanyak 5 faktor yang secara langsung mendorong tingginya angka perkawinan anak di Kalimantan Barat, yaitu;

1. Perspektif usia layak menikah berdasarkan tanda-tanda kedewasaan (*akil baligh*);
2. Putus sekolah;
3. Pergaulan bebas/penyalahgunaan TI;
4. Tidak produktifnya aktivitas remaja/pemuda;
5. Relatif mudahnya penyelenggaraan pernikahan secara adat/agama.

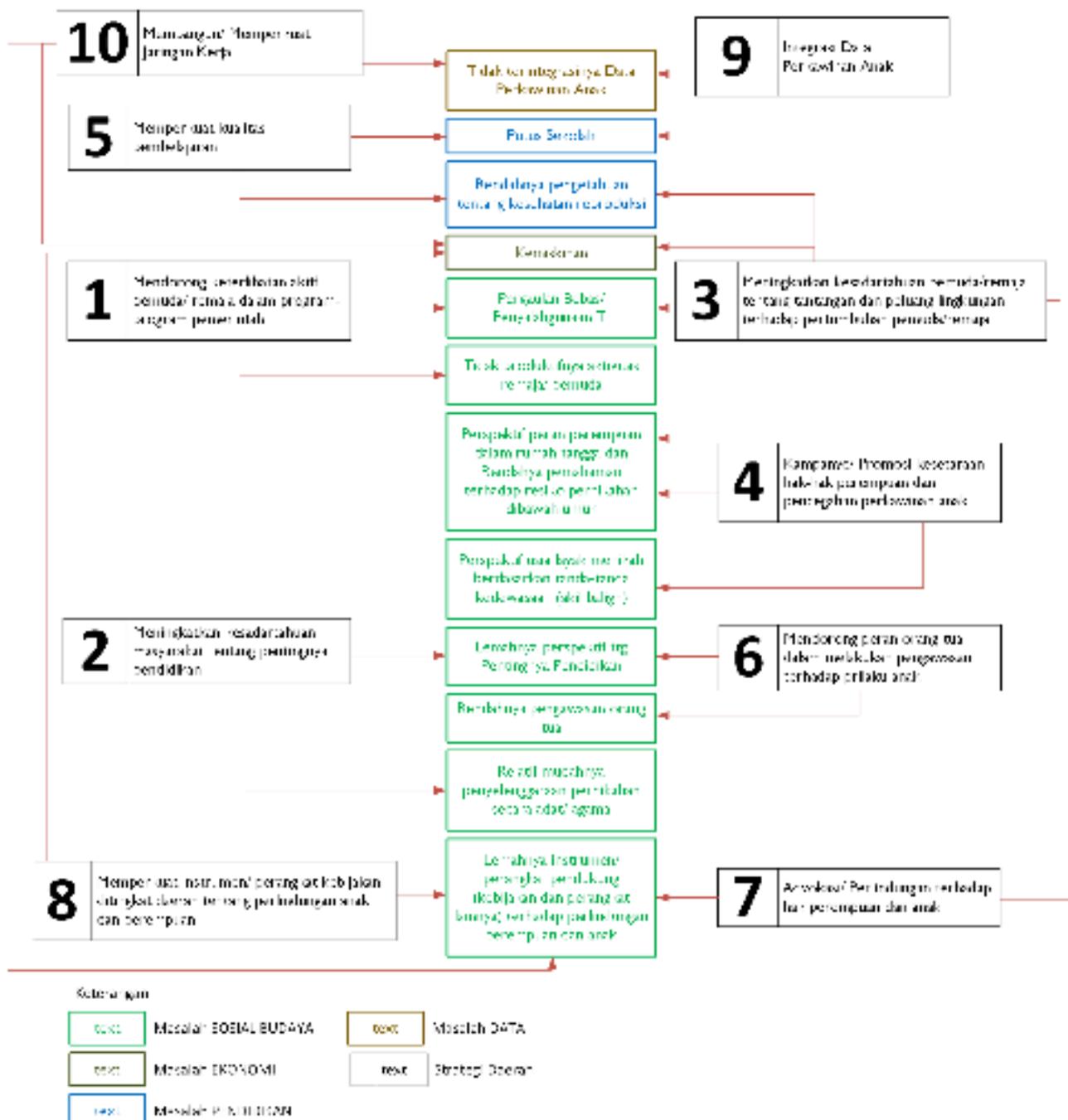
Kelima faktor tersebut, bukan hanya mendorong perkawinan anak secara langsung, namun dapat pula memengaruhi munculnya permasalahan lain karena tingginya angka perkawinan anak di Kalimantan Barat. Semisal, perspektif peran perempuan dalam rumah tangga, yang tidak hanya dapat mendorong perkawinan anak secara langsung, namun dapat pula mendorong tingginya angka putus sekolah. Bahkan disisi lain, perspektif tersebut semakin merasionalisasi perlunya lembaga pernikahan diluar lembaga resmi negara, semisal pernikahan siri melalui lembaga adat tingkat lokal (*desa*), ataupun hanya sekedar mengandalkan tokoh agama setempat.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan akar masalah tersebut, maka diperlukan aksi yang sinergis dan sistematis dari para pihak untuk mengatasi masalah ataupun akar masalah yang mendorong perkawinan anak di Kalimantan Barat.

3.2 Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak

Mengacu pada masalah dan akar masalah yang mendorong perkawinan anak di Kalimantan Barat, setidaknya teridentifikasi sebanyak 10 strategi, sebagaimana ditampilkan pada tabel 1. Masing-masing strategi tersebut diyakini mampu mengatasi beragam masalah dan akar masalah sebagaimana ditampilkan pada diagram 2.

Diagram 3. Strategi Daerah dan Masalah Penyebab Perkawinan Anak di Kalimantan Barat



Sumber: Hasil rumusan FGD yang dilakukan di Melawi, Sintang, Sambas, Ketapang, dan Pontianak pada September-Oktober 2022, dan Loklatih pada Februari 2023.

Relasi tentang bagaimana strategi tersebut mengatasi masalah dan akar masalah dapat dilihat pada diagram 3. Sebagaimana ditampilkan pada diagram 3 dapat terlihat bahwa kesepuluh strategi yang telah dirumuskan tersebut mengintervensi masalah dan akar masalah (sebagaimana yang ditampilkan pada diagram 2 sebelumnya). Mengacu pada strategi daerah tersebut, maka para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan strategi pencegahan perkawinan anak, mengidentifikasi kewenangan dan merumuskan/ memaksimalkan aksi sesuai dengan visi misi organisasinya masing-masing.

3.3 Relasi Strategi Nasional dan Strategi Daerah

Terdapat 5 strategi nasional dalam melakukan pencegahan perkawinan anak, yaitu 1) Optimalisasi Kapasitas Anak; 2) Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak; 3) Aksesibilitas dan Perluasan Layanan; 4) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan; dan 5) Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan. Strategi tersebut diharapkan mampu menjadi rujukan para pemangku kepentingan dalam menjalankan aksi yang mendukung pencegahan perkawinan anak.⁵

Keberadaan strategi daerah Kalimantan Barat tidak secara otomatis mengabaikan keberadaan strategi nasional. Hadirnya strategi daerah mengacu pada permasalahan ditingkat lokal, dan selanjutnya disinergikan dengan strategi nasional.

Mengacu pada permasalahan lokal dengan merujuk pada strategi nasional pencegahan perkawinan anak, maka keberadaan strategi daerah dapat dikelompokkan sebagaimana ditampilkan pada tabel I berikut.

Tabel 1. Relasi Strategi Nasional dan Strategi Daerah

Fokus Strategi	Strategi Nasional		Strategi Daerah	
Mendorong peningkatan kapasitas/ kualitas anak	1	Optimalisasi Kapasitas Anak	1	Mendorong keterlibatan aktif pemuda/ remaja dalam program-program pemerintah
			2	Meningkatkan kesadartahuan masyarakat tentang pentingnya pendidikan
			3	Meningkatkan kesadartahuan pemuda/remaja tentang tantangan dan peluang lingkungan terhadap pertumbuhan pemuda/remaja
Menciptakan/ membangun lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak	2	Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak	4	Kampanye/ Promosi kesetaraan hak-hak perempuan dan pencegahan perkawinan anak
			5	Memperkuat kualitas pembelajaran
			6	Mendorong peran orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku anak
Memberikan jaminan terhadap perlindungan hak anak	3	Aksesibilitas dan Perluasan Layanan	7	Advokasi/ Perlindungan terhadap hak perempuan dan anak
Mendorong adanya regulasi/ penguatan regulasi yang ada, dan/ atau memperkuat perangkat kelembagaan perangkat daerah terkait	4	Penguatan Regulasi dan Kelembagaan	8	Memperkuat instrumen/ perangkat pendukung (kebijakan dan perangkat lainnya) ditingkat daerah tentang perlindungan anak dan perempuan
Membangun/ memperkuat sistem informasi tentang perkawinan anak	4	Penguatan Regulasi dan Kelembagaan	9	Integrasi Data Perkawinan Anak
Membangun/ meningkatkan sinergitas antar aktor dalam pencegahan perkawinan anak	5	Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan	10	Membangun/ Memperkuat Jaringan Kerja

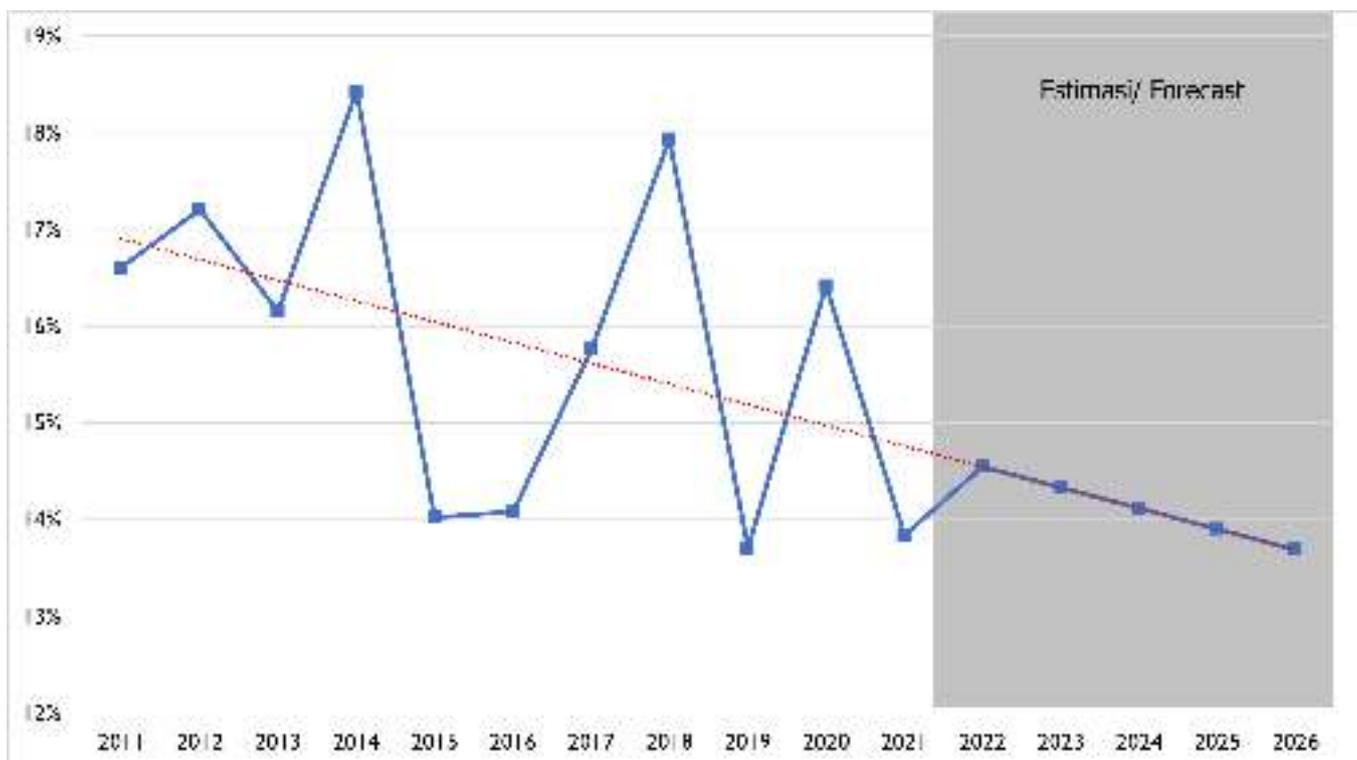
⁵Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2020

3.4 Target Aksi Pencegahan Perkawinan Anak

Secara nasional, ditargetkan adanya penurunan angka perkawinan anak menjadi 8,74% ditahun 2024, dan secara konsisten menurun hingga 6,94% ditahun 2030⁶. Komitmen Pemerintah Daerah (provinsi/ kabupaten/ kota) yang ada di Kalimantan Barat sesungguhnya sebagai salah satu bentuk capaian target dari strategi nasional, mengingat upaya pencapaian target stranas jangka pendek, salah satunya adalah terwujudnya komitmen kuat dari pemerintahan disetiap tingkatan untuk mencegah perkawinan anak.

Di Kalimantan Barat, angka perkawinan anak sangat mengkhawatirkan dan berada diatas rata-rata nasional. Kemudian, tren perkawinan anak di Kalimantan Barat 2011-2020 (sebagaimana ditampilkan pada grafik 3 sebelumnya) cenderung fluktuatif, yaitu berkisar antara 13,71% hingga 18,43%. Terjadi penurunan sebesar 2,77% dari tahun 2011 ke 2021.

Grafik 7. Persentase Perkawinan Usia 19 Tahun Kebawah 2011-2026 di Kalimantan Barat⁷



Sebagaimana yang ditampilkan pada grafik 7, diestimasikan bahwa angka perkawinan anak ditahun 2026 adalah sebesar 13,69%, atau mengalami penurunan sebesar 0,15% dihitung dari tahun 2021. Konsistensi penurunan diprediksi terjadi sejak 2022 hingga 2026, yaitu sebesar 0,21%. Keadaan tersebut terjadi tanpa adanya intervensi yang sistematis dalam pencegahan perkawinan anak (**business as usual**).

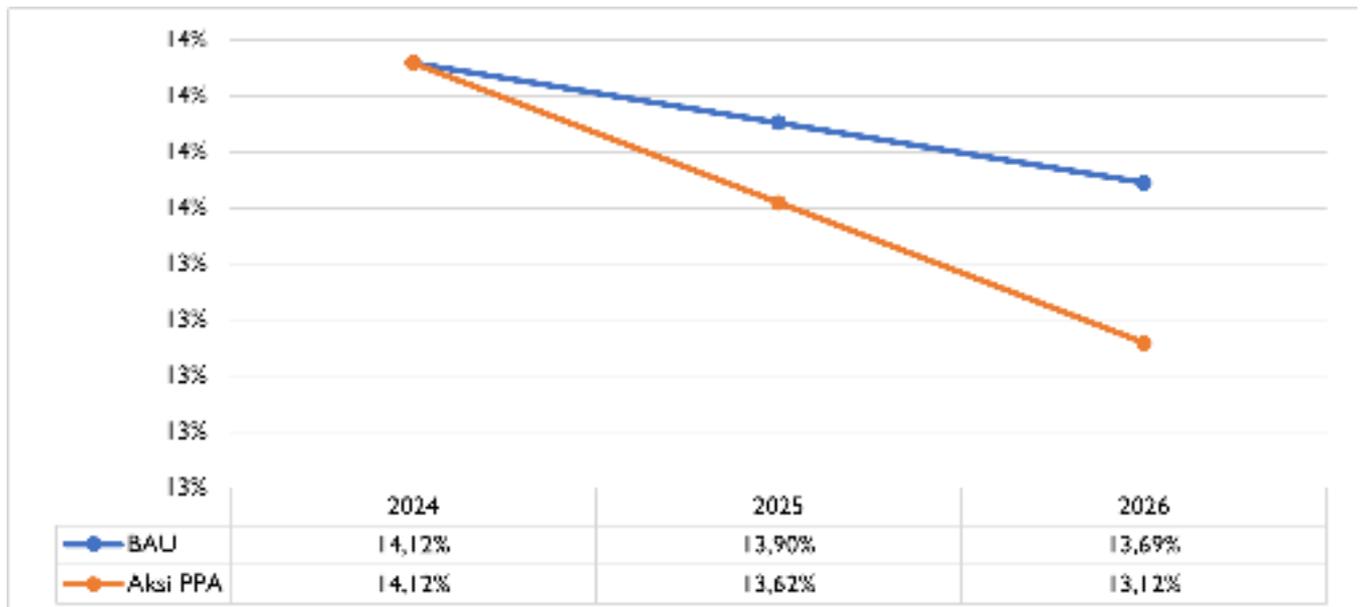
6 Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2020

7 Sumber data olahan Susenas Maret 2021, dengan mengelompokkan usia warga menikah pertama kali berdasarkan kelompok usia 19 tahun keatas dan kebawah.

8 Tahun 2011-2020 bersumber dari olahan susenas Maret 2011, tahun 2021 bersumber dari Indeks Pembangunan Pemuda pada indikator perkawinan anak (X13), sedangkan data ditahun 2022 keatas tidak/ belum tersedia sehingga menggunakan estimasi/ forecast

Mengacu pada pertimbangan tersebut, maka dengan adanya upaya pencegahan perkawinan anak maka ditargetkan adanya penurunan perkawinan anak ditahun 2026 menjadi sebesar 13,12% dengan penurunan secara konsisten pertahun sebesar 0,5% terhitung sejak 2024.

Grafik 8. Target Penurunan Angka Perkawinan Anak 2024-2026



Sumber: Forecast dari data olahan Perkawinan Anak Kalimantan Barat (2011-2021), BPS 2021 dan Kemenpora RI 2023

BAB 4.

Aktor dan Aksi

4.1 Strategi dan Aktor

Dalam melakukan pencegahan perkawinan anak di Kalimantan Barat yang sinergis dan sistematis, maka diperlukan peran aktif dari banyak pihak, level, dan juga unsur. Baik dari unsur pemerintah (pusat dan daerah) serta unsur organisasi non-pemerintah. Beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan strategi daerah pencegahan perkawinan anak, yaitu:

Tabel 2. Aktor dan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak

1	Mendorong keterlibatan aktif pemuda/ remaja dalam program-program pemerintah	Instansi Vertikal	Perwakilan BKKBN Kalbar	Provinsi	
		Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		Sambas
			Dinas Kesehatan		
			Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak		
			Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketapang	
		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Melawi		
		Dinas Sosial	Provinsi		
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Ketapang				
2	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan	Instansi Vertikal	Kantor Wilayah Kementerian Agama	Provinsi	
			Perwakilan BKKBN Kalbar		
		Non Pemerintah	Ikatan Dokter Indonesia (IDI)	Ketapang	
		Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Provinsi	
			Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sambas			

No	Strategi	Unsur	Aktor	Lokus
3	Meningkatkan kesadaran pemuda/remaja tentang tantangan dan peluang lingkungan terhadap pertumbuhan pemuda/remaja	Instansi Vertikal	Perwakilan BKKBN Kalbar	Provinsi
		Non Pemerintah	Forum Generasi Berencana (Genre)	Ketapang
			Gerakan Indonesia Anti Narkotika	Sintang
			Ikatan Bidan Indonesia (IBI)	Ketapang
			Ikatan Dokter Indonesia (IDI)	Sintang
			Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia	Ketapang
		Perangkat Daerah	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Sintang
			Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Provinsi
			Dinas Kesehatan	Ketapang
				Melawi
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Provinsi
			Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	
			Dinas Sosial	
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Ketapang			

**Perkawinan Anak
di Kalimantan Barat**

No	Strategi	Unsur	Aktor	Lokus
4	Kampanye/ Promosi kesetaraan hak-hak perempuan dan pencegahan perkawinan anak	Instansi Vertikal	Kantor Kementerian Agama	Ketapang
			Pengadilan Agama	Sintang
			Perwakilan BKKBN Kalbar	Provinsi
		Non Pemerintah	Aisyiah	Sintang
			Forum Anak	Ketapang
				Sintang
			Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	Melawi
			Ikatan Dokter Indonesia (IDI)	Sintang
			Keuskupan Gereja Katolik	Melawi
			Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Sintang
		Wahana Visi Indonesia	Melawi	
		Perangkat Daerah	Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda	Sambas
			Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Sintang
				Melawi
			Dinas Kesehatan	Provinsi
				Sambas
				Sintang
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Ketapang
			Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Provinsi
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sambas			
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Melawi			
Dinas Sosial	Sintang			
5	Memperkuat kualitas pembelajaran	Instansi Vertikal	Kantor Kementerian Agama	Melawi
			Kementerian Agama	Sintang
			Perwakilan BKKBN Kalbar	Provinsi
		Non Pemerintah	Forum Anak	Ketapang
			Forum Generasi Berencana (Genre)	
		Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Melawi
				Sintang
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketapang
				Melawi
Provinsi				
Sambas				
Sintang				

No	Strategi	Unsur	Aktor	Lokus
6	Mendorong peran orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku anak	Non Pemerintah	Forum Anak Melawi	Melawi
		Perangkat Daerah	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Sintang
			Dinas Kesehatan	Sambas
				Sintang
			Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Provinsi
			Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sambas
			Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Melawi
			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Ketapang
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sambas			
7	Advokasi/ Perlindungan terhadap hak perempuan dan anak	Instansi Vertikal	Perwakilan BKKBN Kalbar	Provinsi
		Non Pemerintah	Forum Anak	Ketapang
		Perangkat Daerah	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Sintang
			Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Provinsi
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Melawi			
8	Memperkuat instrumen/ perangkat pendukung (kebijakan dan perangkat lainnya) ditingkat daerah tentang perlindungan anak dan perempuan	Instansi Vertikal	Perwakilan BKKBN Kalbar	Provinsi
		Non Pemerintah	Keuskupan Gereja Katholik	Sintang
		Perangkat Daerah	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Sambas
			Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Sintang
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Provinsi
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Ketapang
				Sintang
Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Provinsi			
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sambas			

No	Strategi	Unsur	Aktor	Lokus	
9	Integrasi Data Perkawinan Anak	Instansi Vertikal	Kantor Kementerian Agama	Sambas	
			Perwakilan BKKBN Kalbar	Provinsi	
		Perangkat Daerah	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kabupaten
					Melawi
					Provinsi
				Dinas Kesehatan	Melawi
				Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Kabupaten
				Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sambas
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Melawi
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Ketapang
10	Membangun/ Memperkuat Jaringan Kerja	Instansi Vertikal	Pengadilan Agama	Ketapang	
				Sintang	
			Perwakilan BKKBN Kalbar	Provinsi	
		Non Pemerintah	Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)		Sambas
				Ikatan Dokter Indonesia (IDI)	Sintang
		Perangkat Daerah	Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda		Sambas
				Bidang Tata Pemerintahan Setda	Melawi
				Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Sintang
				Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Provinsi
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Melawi
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sambas				

4.2 Sinergitas Aksi

Mengacu pada strategi dan aktor, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 3, maka masing-masing aktor merumuskan program sesuai dengan kewenangannya, yang diyakini berkontribusi dalam mengurangi angka perkawinan anak di Kalimantan Barat. Sinergitas aksi antar aktor, selain mengacu pada strategi yang telah dirumuskan tersebut, juga mengacu pada sasaran program. Sinergitas mengacu pada sasaran program, dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 3. Sinergitas Aksi Pencegahan Perkawinan Anak

Dimensi	Masalah dan Akar Masalah	Strategi	Sasaran	Lokus	Aktor	Sub Kegiatan	Deskripsi Sub Kegiatan
SOSIAL BUDAYA	Lemahnya instrumen/ perangkat pendukung (kebijakan dan perangkat lainnya) terhadap perlindungan perempuan dan anak	Advokasi/ Perlindungan terhadap hak perempuan dan anak	Remaja	Melawi	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan par tisipasi perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya advokasi kebijakan dan perlindungan layanan bagi perempuan korban kekerasan	
				Sintang	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	jumlah kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak yang dilaksanakan
			Perangkat Daerah dan Lembaga Terkait	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Membentuk anggota SATGAS perlindungan anak terpadu

Dimensi	Masalah dan Akar Masalah	Strategi	Sasaran	Locus	Aktor	Sub Kegiatan	Deskripsi Sub Kegiatan
				Melawi	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota
						Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelembagaan Pengaruutamaan Gender (PUG)
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembentukan PUSPAGA. Lembaga ini untuk pelayanan meningkatkan kehidupan keluarga, melalui pendidikan pengasuhan keterampilan untuk menjadi orang tua, keterampilan mendidik anak dan kemampuan konseling bagi anak. Edukasi kepada keluarga agar tidak mudah menikahkan anak.
			Masyarakat	Provinsi	Perwakilan BKKBN Kalbar	Memberikan Pembinaan Secara Berkesinambungan Pada Daerah yang Termasuk Kampung Keluarga Berkualitas	Memberikan KIE Kepada Masyarakat Khususnya perempuan dan anak di kampung Keluarga Berkualitas
				Ketapang	Forum Anak	Layanan pengaduan Anak	Kotak layanan pengaduan secara daring melalui google form
			Membangun/ Memperkuat Jaringan Kerja	Perangkat Daerah dan Lembaga Terkait	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

Dimensi	Masalah dan Akar Masalah	Strategi	Sasaran	Lokus	Aktor	Sub Kegiatan	Deskripsi Sub Kegiatan
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Memberikan dorongan pada dunia usaha untuk meningkatkan partisipasi dalam perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Ini terkait dengan KLA (Kampung Layak Anak) - Pada KLA ini ada aksi pemberdayaan masyarakat terutama pada ibu-ibu
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Meningkatkan komitmen penganggaran responsif gender pada lembaga pemerintah
				Ketapang	Pengadilan Agama	Pelaksanaan MoU Dispensasi Nikah	Pelibatan konselor/psikolog yang ditunjuk Dinsos PPPAKB. Hasil konsultasi dengan konselor/psikolog menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menerbitkan dispensasi kawin
				Melawi	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi UU Perlindungan Anak dan Sosialisasi Perda Perlindungan Anak terbaru yang telah direvisi kepada pihak lingkup perangkat daerah dan masyarakat

Dimensi	Masalah dan Akar Masalah	Strategi	Sasaran	Lokus	Aktor	Sub Kegiatan	Deskripsi Sub Kegiatan
					Bidang Tata Pemerintahan Setda	Mou Dispensasi Kawin	MoU antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, DP3AP2KB dan Dinas Kesehatan terkait penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH) dalam hal Dispensasi Kawin. Sinergitas tupoksi masing-masing pihak yaitu Pengadilan Agama, Kementerian Agama, DP2KBP3A dan Dinas Kesehatan dalam penanganan ABH Dispensasi Kawin
				Sambas	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peningkatan kapasitas lembaga desa (RT,RW, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan POSYANDU)	Peningkatan kapasitas lembaga desa (RT,RW, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan POSYANDU)
				Sintang	Pengadilan Agama	Nota Kesepahaman dengan Dinas Kesehatan	Syarat keterangan kesehatan reproduksi calon pengantin dibawah umur sebagai syarat untuk memberikan dispensasi perkawinan
			Nota Kesepahaman tentang keterangan kesehatan jiwa calon pengantin			Merumuskan pentingnya rekomendasi kesehatan jiwa calon pengantin usia dini sebagai syarat pemberian dispensasi (bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, IBI, dan IDI)	

Dimensi	Masalah dan Akar Masalah	Strategi	Sasaran	Lokus	Aktor	Sub Kegiatan	Deskripsi Sub Kegiatan	
					Ikatan Dokter Indonesia (IDI)	Nota Kesepahaman tentang keterangan kesehatan jiwa calon pengantin	Merumuskan pentingnya rekomendasi kesehatan jiwa calon pengantin usia dini sebagai syarat pemberian dispensasi (bekerjasama dengan Pengadilan Agama)	
					Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah lembaga pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	
		Memperkuat instrumen/ perangkat pendukung (kebijakan dan perangkat lainnya) ditingkat daerah tentang perlindungan anak dan perempuan	Perangkat Daerah dan Lembaga Terkait	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Memfasilitas Regulasi Rencana Aksi Pencegahan Perkawinana Anak	
				Ketapang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Sosialisasi Penyusunan Perdes Pencegahan Perkawinan Anak	
				Sintang	Keuskupan Gereja Katholik	Larangan di tiap gereja untuk menikahkan anak dibawah umur	berlaku untuk tiap gereja katholik	
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Mendorong adanya Peraturan Desa (Perdes) tentang Larangan Tidak Boleh Menikah di Usia Dini yang berisikan saknsi/denda	
		Lemahnya perspektif ttg Pentingnya Pendidikan	Mendorong peran orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap prilaku anak	Orang Tua/ Keluarga	Melawi	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Jumlah Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Dimensi	Masalah dan Akar Masalah	Strategi	Sasaran	Lokus	Aktor	Sub Kegiatan	Deskripsi Sub Kegiatan			
						Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Jumlah Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
						Masyarakat	Sambas	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Pemberian informasi mengenai akses ke layanan pendidik dan kesehatan dasar, seperti fasilitasi pembuatan Kartu Identitas Anak
								Dinas Kesehatan	PUSKESMAS	Pelayanan terpadu di PUSKESMAS
		Meningkatkan kesadartahuan masyarakat tentang pentingnya pendidikan	Remaja	Provinsi		Kantor Wilayah Kementerian Agama	Pemberian beasiswa santri berprestasi dari dalam dan luar negeri.			
						Dinas Kesehatan	Tes Menjelang Pernikahan	Konseling/komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kesehatan reproduksi calon pengantin - Skrining kesehatan bagi calon pengantin, minimal pemeriksaan status gizi meliputi: (pemeriksaan berat badan, tinggi badan, penentuan Indeks Masa Tubuh (IMT), pemeriksaan lingkaran lengan atas/LILA) dan tanda anemia (pemeriksaan kongjungtiva dan pemeriksaan Hb)		
					Perangkat Daerah dan Lembaga Terkait	Ketapang	Ikatan Dokter Indonesia (IDI)	Penyuluhan dan Edukasi Kesehatan Reproduksi	Penyiapan guru di setiap sekolah sebagai konselor kesehatan reproduksi	

Dimensi	Masalah dan Akar Masalah	Strategi	Sasaran	Lokus	Aktor	Sub Kegiatan	Deskripsi Sub Kegiatan
				Sambas	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi pengembangan sekolah layak anak dan deklarasi dan pembetulan sekolah ramah anak
				Pelajar	Provinsi	Perwakilan BKKBN Kalbar	memberikan Pembelajaran Kependudukan Siswa SMA Sederajat
			Kantor Wilayah Kementerian Agama			Bimbingan Remaja Usia Sekolah	Sosialisasi pada remaja usia sekolah tentang pencegahan perkawinan anak
	Pergaulan Bebas/ Penyalahgunaan TI	Mendorong keterlibatan aktif pemuda/ remaja dalam program-program pemerintah	Remaja	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pembentukan pengurus Forum Anak Daerah, Penyediaan ruangan khusus untuk pengurus FAD, monitoring kegiatan FAD
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Peningkatan kapasitas forum anak prov/kab terkait pencegahan perkawinan anak
						Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Kapasitas pemuda dan remaja sebagai pelopor dan pelapor dalam pencegahan perkawinan anak
					Perwakilan BKKBN Kalbar	Memberikan pelatihan dan Pemberian Bantuan Alat Tepat Guna	Memberikan bantuan berupa pelatihan dan alat tepat guna
					Dinas Kesehatan	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pelatihan kader posyandu remaja untuk kampanye bahaya perkawinan anak di sektor kesehatan

Dimensi	Masalah dan Akar Masalah	Strategi	Sasaran	Lokus	Aktor	Sub Kegiatan	Deskripsi Sub Kegiatan
					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pemben-tukan dan Pengembangan Pusat pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olarhaga Yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Dunia Usaha	peningkatan kapasitas dan kualitas atlet PPLP dalam pencapaian prestasi terbaik di bidang olahraga
						Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
				Melawi	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja) yakni melibatkan remaja, remaja dilatih menjadi konselor yang mana sebagai teman konseling bagi remaja-remaja lainnya. Dari ini PIK-R dapat digunakan untuk edukasi terkait pencegahan perkawinan anak dari remaja ke remaja lain. Khusus PIK-R sebenarnya sudah ada disekolah-sekolah terutama tingkat SMA
							Sambas
				Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	Peningkatan Kapasitas PIK-R		
				Orang Tua/ Keluarga	Sambas	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kampung Keluarga Berkualitas (KB)

Dimensi	Masalah dan Akar Masalah	Strategi	Sasaran	Lokus	Aktor	Sub Kegiatan	Deskripsi Sub Kegiatan
		Meningkatkan kesadaran/pemuda/remaja tentang tantangan dan peluang lingkungan terhadap pertumbuhan pemuda/remaja	Remaja	Provinsi	Perwakilan BKKBN Kalbar	Memberikan Penyuluhan dan Sosialisasi Kepada Remaja dan Keluarga	Forum Genre Sosialisasi Stop Kawin Muda Mlibatkan Remaja Usia 15-24 Tahun di Tingkat Kabupaten dan Bina Keluarga Remaja
						Fasilitasi dan Pembinaan PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	PIK-R ialah Wadah diskusi pada teman sebaya sebagai konselor (teman sebaya yang memiliki sertifikasi). Ada pelatihan. Juga memiliki fungsi untuk pencegahan perkawinan dini BKR ialah sasarannya pada keluarga yang memiliki remaja yang mana mengedukasi terkait kesehatan reproduksi pada remaja. Bisa saja memasukkan edukasi terkait pengelolaan keuangan pada keluarga remaja.
						Pendidikan dan Pelatihan Bagi GENRE	Memberikan KIE kepada Remaja Tentang pentingnya Keluarga Berkualitas
						Memberikan Penyuluhan Mengenai kesehatan Reproduksi Remaja	Mengadakan Sosialisasi Kepada remaja dengan bekerjasama dengan BKKBN
						Memberikan Sosialisasi Kepemudaan Katholik dan kelompok keagamaan lainnya	Kerjasama dengan Remaja Katholik di Tingkat Provinsi/ Kabupaten Kota Untuk Sosialisai Pencegahan Perkawinan Anak
					Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Meningkatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial

Dimensi	Masalah dan Akar Masalah	Strategi	Sasaran	Lokus	Aktor	Sub Kegiatan	Deskripsi Sub Kegiatan
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Mendorong peran serta masyarakat khususnya pemuda
					Dinas Kesehatan	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Pemeriksaan kesehatan, pendidikan karakter hidup sehat yang menasar remaja dan meningkatkan kapasitas untuk konselor sebaya (remaja)
					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Meningkatkan kapasitas pemuda dalam bidang Pendidikan, IT, Pangan, SDA dan Lingkungan Hidup, SDA Sosial dan agama
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi		Pembinaan untuk meningkatkan kapasitas wirausaha muda seluruh kabupaten/ kota	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi		Meningkatkan kesadartahuan dan daya saing pemuda kader/ remaja sosial budaya, pendidikan dan pariwisata ditingkat nasional dan internasional	
				Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi		Mendukung kegiatan Pramuka di tingkat Provinsi melalui dana Hibah untuk mendukung kegiatan Kwarda dan Kwardcab	
				Ketapang	Forum Generasi Berencana (Genre)	Pusat Informasi dan Konsoling Remaja	Wadah konsultasi dan bimbingan psikologi bagi remaja mengenai permasalahan pribadi, keluarga, maupun lingkungan

Dimensi	Masalah dan Akar Masalah	Strategi	Sasaran	Lokus	Aktor	Sub Kegiatan	Deskripsi Sub Kegiatan
					Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Pembinaan terhadap remaja dilakukan melalui Program Generasi Berencana (Genre) yang mempromosikan pendewasaan usia perkawinan
			Pelajar	Ketapang	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Posyandu Remaja
			Masyarakat	Sintang	Gerakan Indonesia Anti Narkotika	Penyuluhan	memuat materi tentang PPA dalam kampanye anti narkoba
	Perspektif peran perempuan dalam rumah tangga dan Rendahnya pemahaman terhadap resiko pernikahan dibawah umur	Advokasi/ Perlindungan terhadap hak perempuan dan anak	Remaja	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Menerima layanan pengaduan dan memberikan pelayanan tindak lanjut

Dimensi	Masalah dan Akar Masalah	Strategi	Sasaran	Lokus	Aktor	Sub Kegiatan	Deskripsi Sub Kegiatan
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Memberikan perlindungan terhadap perempuan korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan dini karena terkait kasus kawin kontrak pada wanita di usia muda <19 tahun penyebabnya kesenjangan ekonomi dan Adanya Kampanye 3 Ends : 1. Akhiri Kekerasan thd Perempuan dan Anak, 2. Akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan, 3. Akhiri perdagangan orang. (Sasaran aksi ini ke Remaja Usia Sekolah (SMA) dan kampanye di kabupaten bekerjasama dengan DP3A kabupaten.
		Kampanye/ Promosi kesetaraan hak-hak perempuan dan pencegahan perkawinan anak	Remaja	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Memberikan Pendampingan untuk meningkatkan pemahaman dampak pernikahan anak
					Dinas Kesehatan	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Sosialisasi tentang rentannya Perkawinan Anak pada saat pelaksanaan Pemberian tablet tambah darah guna menguatkan kesehatan reproduksi remaja putri
				Ketapang	Forum Anak	Kampanye mengenai Pencegahan Perkawinan Anak	Kampanye melalui media sosial mengenai hak-hak anak dan pencegahan perkawinan anak
				Sintang	Pengadilan Agama	Mediasi	Memberikan informasi terhadap calon pengantin usia dini terhadap resiko perkawinan bawah umur

Dimensi	Masalah dan Akar Masalah	Strategi	Sasaran	Lokus	Aktor	Sub Kegiatan	Deskripsi Sub Kegiatan
					Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Pembinaan Anak dan Remaja	bekerjasama dan DKBP3A
					Forum Anak	Live Education	Melalui instagram melakukan kampanye pencegahan perkawinan anak
			Perangkat Daerah dan Lembaga Terkait	Sambas	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program CEPAK (Cegah Perkawinan Anak)	Penyuluhan kepada kader PKK Se-Kabupaten Sambas mengenai PPA, stunting, KESPRO dan lain-lain dengan melibatkan dinas terkait untuk menjadi penyuluh/pemateri
					Sintang	Dinas Sosial	FGD Tingkat Desa (APBN)
			Pelajar	Melawi	Dinas Kesehatan	Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri	Pelayanan Kesehatan Pendidikan Dasar Mengacu Petunjuk Teknis Kementerian Kesehatan
				Sambas	Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda	Seribu Da'i	Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas melalui Bidang Kesra Setda Kabupaten Sambas, memiliki program 1.000 Dai yang menysasar ke sekolah-sekolah.
				Sintang	Forum Anak	Peringatan Hari Anak Nasional	Melakukan roadshow ke sekolah-sekolah melakukan kampanye pencegahan perkawinan anak
			Orang Tua/ Keluarga	Melawi	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Sosialisasi Dan Kampanye Isu Pencegahan Perkawinan Anak	PKK dalam setiap program kerjanya akan menyisipkan sosialisasi pencegahan perkawinan anak dan berkolaborasi dengan DP2KBP3A

Dimensi	Masalah dan Akar Masalah	Strategi	Sasaran	Lokus	Aktor	Sub Kegiatan	Deskripsi Sub Kegiatan
				Sintang	Aisyiah	Pembinaan pada anak2 panti asuhan	melalui panti asuhan yang dikelola, juga memberikan pendidikan seks untuk pencegahan perkawinan anak sejak dini
			Masyarakat	Provinsi	Perwakilan BKKBN Kalbar	Memberikan KIE secara berkelanjutan	Mengadakan KIE kepada masyarakat Khususnya perempuan dan Anak di Kampung Keluarga Berkualitas.
				Ketapang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Mendorong masuknya program-program pencegahan perkawinan anak, seperti sosialisasi pada Perencanaan Pembangunan Desa
				Melawi	Wahana Visi Indonesia	Sosialisasi Dan Kampanye Isu Pencegahan Perkawinan Anak	WVI siap bekerjasama dalam mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak dan berkolaborasi dengan forum anak
					Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	Sosialisasi Dan Kampanye Isu Pencegahan Perkawinan Anak	GOW akan ada program kerja untuk pencegahan stunting dengan materi praktek pembuatan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), yang juga nantinya akan diselingi dengan sosialisasi pencegahan perkawinan anak.
					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Adanya Sosialisasi Pengarustamaan Gender terkait mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, upaya menepis perspektif peran perempuan dalam rumah tangga
				Sambas	Dinas Kesehatan	PUSKESMAS	Pelayanan terpadu di PUSKESMAS

Dimensi	Masalah dan Akar Masalah	Strategi	Sasaran	Lokus	Aktor	Sub Kegiatan	Deskripsi Sub Kegiatan	
						Unit KIA-KB	Tersedianya unit KIA-KB di Puskesmas	
						Pembinaan terpadu Kampung Keluarga Berkualitas (KB)	Pembinaan kampung keluarga berkualitas yang sudah terbentuk dengan melibatkan posyandu remaja	
				Sintang	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	pengembangan KIE anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	jumlah kegiatan KIE yang dilakukan	
				Remaja	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Memfasilitasi muatan pencegahan perkawinan anak agenda forum puspa
		Meningkatkan kesadaran pemuda/remaja tentang tantangan dan peluang lingkungan terhadap pertumbuhan pemuda/remaja	Perangkat Daerah dan Lembaga Terkait		Ketapang	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan koordinasi Anggota Gugus Tugas KLA dan Masyarakat di Kecamatan untuk inisiasi pembentukan kecamatan dan Desa/ Kelurahan layak anak
					Ketapang	Kantor Kementerian Agama	Penyuluh Agama Islam dan Penasihat perkawinan	Penyuluhan dan bimbingan terhadap pasangan calon pengantin dalam membangun rumah tangga berkualitas dan pola pengasuhan terbaik untuk anak
	Remaja	Melawi	Keuskupan Gereja Katolik	Sosialisasi Dan Kampanye Isu Pencegahan Perkawinan Anak				
		Perspektif usia layak menikah berdasarkan tanda-tanda kedewasaan (akil baligh)	Kampanye/ Promosi kesetaraan hak-hak perempuan dan pencegahan perkawinan anak					

Dimensi	Masalah dan Akar Masalah	Strategi	Sasaran	Lokus	Aktor	Sub Kegiatan	Deskripsi Sub Kegiatan
					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kader-Kader TPK (Tim Pendamping Keluarga) yakni tergabung dalam BKR (Bina Keluarga Remaja) melakukan penyuluhan/sosialisasi di desa, salah satunya pada remaja yakni dalam menunda perkawinan, namun jika sudah terjadi perkawinan menunda kehamilan.
			Pelajar	Sintang	Ikatan Dokter Indonesia (IDI)	Penyuluhan	Penyuluhan ttg PPA ke remaja-remaja disekolah
			Masyarakat	Provinsi	Perwakilan BKKBN Kalbar	Pelaksanaan Lomba Penjarangan Pemahaman Tentang Kependudukan Berdasarkan Kelompok Umur	Sosialisasi mengenai pencegahan perkawinan anak ditingkat masyarakat
				Ketapang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Peningkatan kapasitas masyarakat dan desa serta sosialisasi pencegahan perkawinan anak kepada lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
				Melawi	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota. Terkait upaya pencegahan perkawinan anak, bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dapat diberikan kepada anak terlantar serta petugas PMKS yang bertugas di setiap kecamatan dapat mensosialisasikan upaya pencegahan perkawinan anak pada anak-anak terlantar

Dimensi	Masalah dan Akar Masalah	Strategi	Sasaran	Lokus	Aktor	Sub Kegiatan	Deskripsi Sub Kegiatan
					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) : adanya sosialisasi/edukasi kepada kepala keluarga atau orangtua terkait regulasi minimal usia menikah dan parenting (pola asuh orangtua). Dalam hal ini ada tujuan untuk bekerjasama dengan DPMPDes yang mana mendorong desa dengan anggaran ADD untuk mengadakan sosialisasi tersebut kepada kepala keluarga di desa-desa
				Sintang	Dinas Kesehatan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Penyadartahuan masyarakat tentang bahaya/ resiko perkawinan anak
	Relatif mudahnya penyelenggaraa n pernikahan secara adat/ agama	Memperkuat instrumen/ perangkat pendukung (kebijakan dan perangkat lainnya) ditingkat daerah tentang perlindungan anak dan perempuan	Remaja	Provinsi	Perwakilan BKKBN Kalbar	Penyediaan Aplikasi Untuk Persiapan Pernikahan	Menerapkan Program Elsimil kepada Pemuda/l yang akan menikah
		Perangkat Daerah dan Lembaga Terkait	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Mendorong adanya Peraturan Desa (Perdes) tentang Larangan Tidak Boleh Menikah di Usia Dini yang berisikan saknsi/denda	

Dimensi	Masalah dan Akar Masalah	Strategi	Sasaran	Lokus	Aktor	Sub Kegiatan	Deskripsi Sub Kegiatan
				Sambas	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perdes Perlindungan Anak Berbasis Adat	Adanya PERDES mengenai pencegahan perkawinan anak. Tahun 2022 telah dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh kepala desa mengenai penyusunan PERDES pencegahan perkawinan anak. Tahun 2023 akan ada pelatihan lanjutan mengenai rancangan isi dari PERDES pencegahan perkawinan anak.
	Rendahnya pengawasan orang tua	Mendorong peran orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku anak	Orang Tua/ Keluarga	Ketapang	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Membangun dan meningkatkan kualitas hidup keluarga untuk mewujudkan generasi unggul
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						Meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya, membina tumbuh kembang anak dan remaja baik fisik maupun intelektual, kesehatan reproduksi, mental, emosional, sosial dan moral spiritual secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua atau keluarga dengan remaja	

Dimensi	Masalah dan Akar Masalah	Strategi	Sasaran	Lokus	Aktor	Sub Kegiatan	Deskripsi Sub Kegiatan
				Melawi	Forum Anak Melawi	Sosialisasi Dan Kampanye Isu Pencegahan Perkawinan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pemahaman terhadap orang tua terkait dampak perkawinan anak 2. Menguatkan peraturan usia minimal menikah 3. Melaksanakan bimbingan atau sosialisasi terhadap remaja terkait perkawinan usia anak di sekolah maupun desa-desa 4. Peningkatan pengetahuan dan edukasi tentang bahaya seks bebas sehingga terjadi penurunan perkawinan anak dan stunting.
					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Terhadap Keluarga
				Sambas	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembinaan terpadu Kampung Keluarga Berkualitas (KB)	Pembinaan kampung keluarga berkualitas yang sudah terbentuk
				Sintang	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Penyadartahuan masyarakat tentang bahaya/ resiko perkawinan anak
					Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Memperkuat BKR yang ditujukan bagi keluarga yang memiliki anak remaja

Dimensi	Masalah dan Akar Masalah	Strategi	Sasaran	Lokus	Aktor	Sub Kegiatan	Deskripsi Sub Kegiatan
			Masyarakat	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan
						Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Peran Masyarakat khususnya masyarakat Desa untuk membangun kesadaran, kepedulian dan kemampuan dalam mencegah, mendekteksi dini, memberikan pertolongan pertama dan pelayanan rujukan ketika terjadi kekerasan terhadap anak
	Tidak produktifnya aktivitas remaja/pemuda	Mendorong keterlibatan aktif pemuda/remaja dalam program-program pemerintah	Remaja	Ketapang	Dinas Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Fasilitasi Bakti Karang Taruna Dalam Melakukan Pemberdayaan Sosial seperti Temu Karya dan Jambore
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelibatan anak-anak dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional
						Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi pemenuhan hak Anak bagi lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Regenerasi Forum Anak Daerah (FAD), Bimtek anggota FAD menjadi pelopor dan pelapor
						Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan inisiasi pembentukan aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Bimtek menjadi aktivis PATBM

Dimensi	Masalah dan Akar Masalah	Strategi	Sasaran	Lokus	Aktor	Sub Kegiatan	Deskripsi Sub Kegiatan
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Penyelenggaraan pekan olahraga dan seni bagi siswa dan guru setiap tahun untuk meningkatkan minat dan bakat siswa dalam olahraga dan seni. Berbagai tema dalam kegiatan dapat mengangkat isu pencegahan perkawinan anak

4.3 Kemitraan Strategis (Swasta dan Organisasi Non Pemerintah Lainnya)

Dalam aksi pencegahan perkawinan anak di Kalimantan Barat yang cukup tinggi, dibutuhkan keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuklah swasta dan/ atau organisasi non pemerintah lainnya. Aksi dalam pencegahan perkawinan anak oleh swasta dan/atau organisasi non pemerintah lainnya bersifat kesukarelaan (*voluntary*) yang sinergis dengan pelaksanaan aksi oleh pemerintah daerah.

Beberapa organisasi non pemerintah yang telah berkomitmen dalam aksi pencegahan perkawinan anak adalah;

Tabel 4. Komitmen Lembaga Non Pemerintah dalam Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak

Masalah dan Akar Masalah	Strategi	Lokus Locus	Aktor	Aksi
Rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi	Memperkuat kualitas pembelajaran	Ketapang	Forum Anak	Edukasi Kesehatan Reproduksi
			Forum Generasi Berencana (Genre)	Penyuluhan ke Sekolah
	Meningkatkan kesadartahuan pemuda/remaja tentang tantangan dan peluang lingkungan terhadap pertumbuhan pemuda/remaja	Ketapang	Forum Generasi Berencana (Genre)	Edukasi Kesehatan Reproduksi
			Ikatan Bidan Indonesia (IBI)	Penyuluhan dan Edukasi Kesehatan Reproduksi
			Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia	Penyuluhan dan Edukasi Kesehatan Reproduksi
Sintang	Ikatan Dokter Indonesia (IDI)	Poli Kesehatan Pelayanan Remaja		
Rendahnya pengawasan orang tua	Mendorong peran orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku anak	Melawi	Forum Anak Melawi	Sosialisasi Dan Kampanye Isu Pencegahan Perkawinan Anak
Perspektif usia layak menikah berdasarkan tanda-tanda kedewasaan (akil baligh)	Kampanye/ Promosi kesetaraan hak-hak perempuan dan pencegahan perkawinan anak	Melawi	Keuskupan Gereja Katholik	Sosialisasi Dan Kampanye Isu Pencegahan Perkawinan Anak
		Sintang	Ikatan Dokter Indonesia (IDI)	Penyuluhan
Perspektif peran perempuan dalam rumah tangga dan Rendahnya pemahaman terhadap resiko pernikahan dibawah umur	Kampanye/ Promosi kesetaraan hak-hak perempuan dan pencegahan perkawinan anak	Ketapang	Forum Anak	Kampanye mengenai Pencegahan Perkawinan Anak
		Melawi	Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	Sosialisasi Dan Kampanye Isu Pencegahan Perkawinan Anak
			Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Sosialisasi Dan Kampanye Isu Pencegahan Perkawinan Anak

Masalah dan Akar Masalah	Strategi	Lokus	Aktor	Aksi	
			Wahana Visi Indonesia	Sosialisasi Dan Kampanye Isu Pencegahan Perkawinan Anak	
			Sintang	Aisyiah	Pembinaan pada anak2 panti asuhan
				Forum Anak	Live Education
				Forum Anak	Peringatan Hari Anak Nasional
				Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Pembinaan Anak dan Remaja
Pergaulan Bebas/ Penyalahgunaan TI	Meningkatkan kesadaran/pemuda/remaja tentang tantangan dan peluang lingkungan terhadap pertumbuhan pemuda/remaja	Ketapang	Forum Generasi Berencana (Genre)	Pusat Informasi dan Konsoling Remaja	
		Sintang	Gerakan Indonesia Anti Narkotika	Penyuluhan	
Lemahnya perspektif ttg Pentingnya Pendidikan	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan	Ketapang	Ikatan Dokter Indonesia (IDI)	Penyuluhan dan Edukasi Kesehatan Reproduksi	
Lemahnya instrumen/ perangkat pendukung (kebijakan dan perangkat lainnya) terhadap perlindungan perempuan dan anak	Advokasi/ Perlindungan terhadap hak perempuan dan anak	Ketapang	Forum Anak	Layanan pengaduan Anak	
	Membangun/ Memperkuat Jaringan Kerja	Sintang	Ikatan Dokter Indonesia (IDI)	Nota Kesepahaman tentang keterangan kesehatan jiwa calon pengantin	
	Memperkuat instrumen/ perangkat pendukung (kebijakan dan perangkat lainnya) ditingkat daerah tentang perlindungan anak dan perempuan		Keuskupan Gereja Katholik	Larangan ditiap gereja untuk menikahkan anak dibawah umur	
kemiskinan	Membangun/ Memperkuat Jaringan Kerja	Sambas	Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)	Dukungan program yang berkorelasi terhadap 24 indikator pada 5 kluster kabupaten layak anak	

BAB 5.

Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan

Merujuk pada rumusan strategi, aktor, dan aksi sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 3 dan bab 4, maka para pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana aksi berkomitmen untuk mengatasi rentannya perkawinan anak di Kalimantan Barat sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing pihak. Komitmen tersebut tertuang pula pada rencana strategi dan/ atau rencana kerja para pihak. Untuk memastikan agar aksi para pihak berkontribusi terhadap pencegahan perkawinan anak, dirumuskan pula deskripsi aksi. Rumusan aksi tersebut tertuang pada tabel berikut:

Tabel 5. Rumusan Aksi para pihak dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kalimantan Barat

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI
PROVINSI	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pembentukan dan Pengembangan Pusat pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga Yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Dunia Usaha	peningkatan kapasitas dan kualitas atlet PPLP dalam pencapaian prestasi terbaik di bidang olahraga
		Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Meningkatkan kesadaran dan daya saing pemuda kader/ remaja sosial budaya, pendidikan dan pariwisata di tingkat nasional dan internasional
				Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Meningkatkan kapasitas pemuda dalam bidang Pendidikan, IT, Pangan, SDA dan Lingkungan Hidup, SDA Sosial dan agama
		Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Pembinaan untuk meningkatkan kapasitas wirausaha muda seluruh kabupaten/ kota
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Mendukung kegiatan Pramuka di tingkat Provinsi melalui dana Hibah untuk mendukung kegiatan Kwarda dan Kwarcab				

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Merekap data yang berasal dari Kabupaten/Kota
		Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	
	Dinas Kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dukcapil dapat melakukan pemilahan data berdasarkan kelompok umur.
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pemeriksaan kesehatan, pendidikan karakter hidup sehat yang menysar remaja dan meningkatkan kapasitas untuk konselor sebaya (remaja)
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Pemberian tablet tambah darah guna menguatkan kesehatan reproduksi remaja putri
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pelatihan kader posyandu remaja untuk kampanye bahaya perkawinan anak di sektor kesehatan

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI
				Tes Menjelang Pernikahan	Konseling/komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kesehatan reproduksi calon pengantin - Skrining kesehatan bagi calon pengantin, minimal pemeriksaan status gizi meliputi: (pemeriksaan berat badan, tinggi badan, penentuan Indeks Massa Tubuh (IMT), pemeriksaan lingkaran lengan atas/LILA) dan tanda anemia (pemeriksaan konjungtiva dan pemeriksaan Hb)
		Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Mendorong adanya Peraturan Desa (Perdes) tentang Larangan Tidak Boleh Menikah di Usia Dini yang berisikan sanksi/denda
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Mendorong peran serta masyarakat khususnya pemuda
	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Pemenuhan Hak Anak	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Peningkatan kapasitas forum anak prov/kab terkait pencegahan perkawinan anak

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	membuat komitmen bersama OPD lain dalam mewujudkan kabupaten/ kota layak anak
				Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pembentukan pengurus Forum Anak Daerah, Penyediaan ruangan khusus untuk pengurus FAD, monitoring kegiatan FAD
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Kapasitas pemuda dan remaja sebagai pelopor dan pelapor dalam pencegahan perkawinan anak
		Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Meningkatkan komitmen penganggaran responsif gender pada lembaga pemerintah
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Memberikan peningkatan kapasitas perempuan dalam memperoleh kesetaraan pendapatan
		Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Membentuk Pusat Pelayanan Pembelajaran Keluarga di tiap Kabupaten/Kota (PUSPAGA). Kegiatannya berupa sosialisasi terkait pendidikan pengasuhan, keterampilan menjadi orangtua, keterampilan melindungi anak, sosialisasi ekonomi, sosialisasi kesehatan. Sosialisasi Ekonomi terkait perbaikan ekonomi keluarga, dan ini juga memiliki peran untuk pencegahan perkawinan anak. kemudian puspaga juga berperan dalam kegiatan konseling bagi anak dan keluarga

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI
					Memfasilitasi Regulasi Rencana Aksi Pencegahan Perkawinan Anak
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Pada kegiatan ini pada dasar DP3A melakukan sosialisasi terhadap isu-isu yang sedang trending saat itu. Misalnya tahun 2022, sosialisasi yang dilakukan adalah terkait dengan stunting, kematian ibu dan anak. Namun mengingat hal ini merupakan salah satu dampak dari pernikahan anak, maka dalam proses sosialisasi tersebut DP3A dapat memuat materi berupa mendorong para pihak untuk melakukan proses pendataan pernikahan yang tidak tercatat di tingkat kabupaten/kota.
				Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Memberikan Pendampingan untuk meningkatkan pemahaman dampak pernikahan anak
				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Peran Masyarakat khususnya masyarakat Desa untuk membangun kesadaran, kepedulian dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dini, memberikan pertolongan pertama dan pelayanan rujukan ketika terjadi kekerasan terhadap anak
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Memfasilitasi muatan pencegahan perkawinan anak agenda forum puspa

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI
		Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Kampanye 5 Isu Strategis Arahan Presiden
			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Membentuk anggota SATGAS perlindungan anak terpadu
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Memberikan dorongan pada dunia usaha untuk meningkatkan partisipasi dalam perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Ini terkait dengan KLA (Kampung Layak Anak) - Pada KLA ini ada aksi pemberdayaan masyarakat terutama pada ibu-ibu
		Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Memberikan perlindungan terhadap perempuan korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan dini karena terkait kasus kawin kontrak pada wanita di usia muda <19 tahun penyebabnya kesenjangan ekonomi dan Adanya Kampanye 3 Ends : 1. Akhiri Kekerasan thd Perempuan dan Anak, 2. Akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan, 3. Akhiri perdagangan orang. (Sasaran aksi ini ke Remaja Usia Sekolah (SMA) dan kampanye di kabupaten bekerjasama dengan DP3A kabupaten.

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Menerima layanan pengaduan dan memberikan pelayanan tindak lanjut
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	* Mengeluarkan surat edaran kerjasama dengan sekolah melalui komite sekolah * Pemberian surat edaran kepada komite sekolah untuk mempertimbangkan kembali pemberhentian siswa yang diakibatkan hamil/ pernikahan
		Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Menyelipkan materi mengenai kesehatan reproduksi serta sex education dalam mata pelajaran terkait, seperti IPA, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
				Retrieval Siswa Putus Sekolah (disdikbud)	Bekerjasama dengan pihak sekolah dan komite sekolah, untuk mendata siswa yang putus sekolah untuk kemudian diberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Memberikan surat edaran kepada perusahaan, untuk mendata barangkali ada pekerja yang putus sekolah.
	Dinas Sosial	Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Fasilitasi Bakti Karang Taruna Dalam Melakukan Pemberdayaan Sosial seperti Temu Karya dan Jambore
		Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Meningkatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
	Kantor Wilayah Kementerian Agama			Bimbingan Remaja Usia Sekolah	Sosialisasi pada remaja usia sekolah tentang pencegahan perkawinan anak

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI
				Pemberian beasiswa santri berprestasi dari dalam dan luar negeri.	
Perwakilan BKKBN Kalbar	Pembangunan Keluarga, Kependudukan Dan Keluarga Berencana		Kelompok UPPKA di Kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.	Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi Keluarga Akseptor KB dan Stunting di Kampung KB	aksi ini sebenarnya tidak menasar untuk pencegahan perkawinan dini, dikarenakan sasaran aksi ini kepada keluarga akseptor KB. Namun program/kegiatan UPPKA ini merupakan program pemberdayaan ekonomi keluarga
			PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu.	Fasilitasi dan Pembinaan PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	PIK-R ialah Wadah diskusi pada teman sebaya sebagai konselor (teman sebaya yang memiliki sertifikasi). Ada pelatihan. Juga memiliki fungsi untuk pencegahan perkawinan dini BKR ialah sasarannya pada keluarga yang memiliki remaja yang mana mengedukasi terkait kesehatan reproduksi pada remaja. Bisa saja memasukkan edukasi terkait pengelolaan keuangan pada keluarga remaja.
	Pendidikan Secara Formal Di Tingkat SMA Sederajat	Pembelajaran Pendidikan Kependudukan Bagi Siswa SMA Sederajat	memberikan Pembelajaran Kependudukan Siswa SMA Sederajat	Sosialisasi mengenai pencegahan perkawinan anak di tingkat sekolah SMA sederajat	
			Koordinasi, Sinkronisasi dengan <i>Stakeholder</i> Terkait dan Penguatan Jejaring	Memberdayakan Satgas Stunting dan PPK di Desa/Kampung	
			Memberikan KIE secara berkelanjutan	Mengadakan KIE kepada masyarakat Khususnya perempuan dan Anak di Kampung Keluarga Berkualitas.	
			Memberikan pelatihan dan Pemberian Bantuan Alat Tepat Guna	Memberikan bantuan berupa pelatihan dan alat tepat guna	
			Memberikan Pembinaan Secara Berkesinambungan Pada Daerah yang Termasuk Kampung Keluarga Berkualitas	Memberikan KIE Kepada Masyarakat Khususnya perempuan dan anak di kampung Keluarga Berkualitas	

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI
				Memberikan Penyuluhan dan Sosialisasi Kepada Remaja dan Keluarga	Forum Genre Sosialisasi Stop Kawin Muda Melibatkan Remaja Usia 15-24 Tahun di Tingkat Kabupaten dan Bina Keluarga Remaja
				Memberikan Penyuluhan Mengenai kesehatan Reproduksi Remaja	Mengadakan Sosialisasi Kepada remaja dengan bekerjasama dengan BKKBN
				Memberikan Sosialisasi Kepemudaan Katolik dan kelompok keagamaan lainnya	Kerjasama dengan Remaja Katolik di Tingkat Provinsi/ Kabupaten Kota Untuk Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak
				mengadakan Seminar, Workshop Hasil Penelitian	Hasil Penelitian Menjadi Rekomendasi Ke Instansi Terkait
				Pelaksanaan Lomba Penjarangan Pemahaman Tentang Kependudukan Berdasarkan Kelompok Umur	Sosialisasi mengenai pencegahan perkawinan anak di tingkat masyarakat
				Pembelajaran Melalui Modul Sekolah Siaga Kependudukan Melalui Mulok Pada Sekolah sekolah yang diterbitkan BKKBN	Kerjasama dengan Remaja Katolik di Tingkat Provinsi/ Kabupaten Kota Untuk Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak
				Pendidikan dan Pelatihan Bagi GENRE	Memberikan KIE kepada Remaja Tentang pentingnya Keluarga Berkualitas
				Penyediaan Aplikasi Untuk Persiapan Pernikahan	Menerapkan Program Elsimil kepada Pemuda/l yang akan menikah
KETAPAN G	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Posyandu Remaja
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kampanye dan edukasi kesehatan reproduksi
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Mendorong masuknya program-program pencegahan perkawinan anak, seperti sosialisasi pada Perencanaan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Sosialisasi Penyusunan Perdes Pencegahan Perkawinan Anak

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Peningkatan kapasitas masyarakat dan desa serta sosialisasi pencegahan perkawinan anak kepada lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Gerakan Ayo Sekolah (GAS) untuk mengembalikan anak putus sekolah dan dewasa tidak sekolah agar kembali sekolah melalui Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C)
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Penyelenggaraan pekan olahraga dan seni bagi siswa dan guru setiap tahun untuk meningkatkan minat dan bakat siswa dalam olah raga dan seni. Berbagai tema dalam kegiatan dapat mengangkat isu pencegahan perkawinan anak	
Pengembangan Kurikulum		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Bimbingan teknis atau pelatihan penyusunan muatan lokal pendidikan dasar dengan memuat materi pencegahan dini perkawinan anak	

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI
	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya, membina tumbuh kembang anak dan remaja baik fisik maupun intelektual, kesehatan reproduksi, mental, emosional, sosial dan moral spiritual secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua atau keluarga dengan remaja
				Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Pembinaan terhadap remaja dilakukan melalui Program Generasi Berencana (Genre) yang mempromosikan pendewasaan usia perkawinan
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Membangun dan meningkatkan kualitas hidup keluarga untuk mewujudkan generasi unggul
		Pemenuhan Hak Anak	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan koordinasi Anggota Gugus Tugas KLA dan Masyarakat di Kecamatan untuk inisiasi pembentukan kecamatan dan Desa/ Kelurahan layak anak
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelibatan anak-anak dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi pemenuhan hak Anak bagi lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Regenerasi Forum Anak Daerah (FAD), Bimtek anggota FAD menjadi pelopor dan pelapor	
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan inisiasi pembentukan aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Bimtek menjadi aktivis PATBM	
		Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Masyarakat yang terkait dengan pendataan Gender dan Anak	
	Forum Anak				Edukasi Kesehatan Reproduksi	Penyuluhan/bimbingan mengenai kesehatan reproduksi terhadap pelajar
					Kampanye mengenai Pencegahan Perkawinan Anak	Kampanye melalui media sosial mengenai hak-hak anak dan pencegahan perkawinan anak
					Layanan pengaduan Anak	Kotak layanan pengaduan secara daring melalui google form
	Forum Generasi Berencana (Genre)				Edukasi Kesehatan Reproduksi	Kegiatan penyadartahuan kepada remaja mengenai kesehatan reproduksi dan dampak perkawinan anak
					Penyuluhan ke Sekolah	Penyuluhan ke sekolah-sekolah mengenai kesehatan reproduksi dan dampak perkawinan anak
					Pusat Informasi dan Konseling Remaja	Wadah konsultasi dan bimbingan psikologi bagi remaja mengenai permasalahan pribadi, keluarga, maupun lingkungan

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI
	Ikatan Bidan Indonesia (IBI)			Penyuluhan dan Edukasi Kesehatan Reproduksi	Kegiatan penyadartahuan kepada remaja mengenai kesehatan reproduksi dan dampak perkawinan anak
	Ikatan Dokter Indonesia (IDI)			Penyuluhan dan Edukasi Kesehatan Reproduksi	Penyiapan guru di setiap sekolah sebagai konselor kesehatan reproduksi
	Kantor Kementerian Agama			Penyuluh Agama Islam dan Penasihat perkawinan	Penyuluhan dan bimbingan terhadap pasangan calon pengantin dalam membangun rumah tangga berkualitas dan pola pengasuhan terbaik untuk anak
	Pengadilan Agama			Pelaksanaan MoU Dispensasi Nikah	Pelibatan konselor/psikolog yang ditunjuk Dinas PPPAKB. Hasil konsultasi dengan konselor/psikolog menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menerbitkan dispensasi kawin
	Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia			Penyuluhan dan Edukasi Kesehatan Reproduksi	Kegiatan penyadartahuan kepada remaja mengenai kesehatan reproduksi dan dampak perkawinan anak
MELAWI	Bidang Tata Pemerintahan Setda			Mou Dispensasi Kawin	MoU antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, DP3AP2KB dan Dinas Kesehatan terkait penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH) dalam hal Dispensasi Kawin. Sinergitas tupoksi masing-masing pihak yaitu Pengadilan Agama, Kementerian Agama, DP2KBP3A dan Dinas Kesehatan dalam penanganan ABH Dispensasi Kawin

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Fasilitasi terkait pencatatan sipil	Sosialisasi terkait pencatatan sipil oleh disdukcapil selama ini biasanya apabila diundang oleh gereja yang sedang menikahkan pasangan. Kemudian terkait pencatatan sipil tergantung apabila masyarakat melaporkan pernikahan. Belum ada wacana dari disdukcapil untuk bekerjasama dengan pemerintah desa dan DPMD atau lembaga masyarakat terkait sosialisasi pencatatan perkawinan
		Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil ada wacana (MoU) babbekerjasama dengan Pengadilan Agama dan kementerian agama dalam pencatatan data perkawinan.
	Dinas Kesehatan			Pelayanan Kesehatan Pendidikan Dasar Mengacu Petunjuk Teknis Kementerian Kesehatan-Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	Program dilakukan di sekolah-sekolah, terbentuknya perpanjangan tangan yaitu konselor sebaya di sekolah yang bertugas untuk melayani teman sebayanya dalam masalah kesehatan.
				Pelayanan kesehatan reproduksi pada calon pengantin dengan aplikasi kescatin	Bidan Desa dan Puskesmas melakukan pengecekan kesehatan reproduksi dan dibantu dengan aplikasi kescatin yang berisikan kuesioner tentang kelayakan/kesehatan reproduksi pada calon pengantin. Pada pelayanan kesehatan reproduksi ini terdata mereka yang mana menikah sesuai dengan regulasi minimal usia menikah dan yang mana yang tidak. Terdata pada bidan desa dan puskesmas yang melakukan pelayanan
				Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri	Pelayanan Kesehatan Pendidikan Dasar Mengacu Petunjuk Teknis Kementerian Kesehatan

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI
				Posyandu Remaja oleh Bidan Desa	Pelayanan Kesehatan Pendidikan Dasar Mengacu Petunjuk Teknis Kementerian Kesehatan (edukasi kesehatan reproduksi pada remaja)
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Optimalisasi Program UKS di sekolah-sekolah dengan memasukkan isu stunting, isu perkawinan anak dan pentingnya kespro.	Optimalisasi Program UKS ini sudah disampaikan kepada semua sekolah tingkat SMP per Januari 2023
				Pengintegrasian isu-isu hangat termasuk isu pencegahan perkawinan anak masuk dalam semua mata pelajaran sekolah, terkecuali matematika. Masuk sebagai Pendidikan Karakter, dan Wacana Bimtek ke Guru-Guru	Disdikbud Melawi berencana untuk mensosialisasikan agar sekolah memasukkan isu pencegahan perkawinan masuk dalam pendidikan karakter yang diselipkan pada setiap pembelajaran di sekolah, dan ada wacana dari Disdikbud untuk mengadakan Bimtek ke guru-guru
				Surat Edaran Terkait Sosialisasi Isu Perkawinan Anak	Meminta kepada pihak sekolah untuk mengadakan sosialisasi terkait isu perkawinan anak, kespro, dan kenakalan remaja dengan melibatkan stakeholder seperti dari Dinas Kesehatan, DP2KBP3A atau kepolisian. Sosialisasi dilakukan di sekolah-sekolah terutama tingkat SMP yang mana mensosialisasikan terkait isu perkawinan anak, kespro dan kenakalan remaja yang melibatkan Dinas Kesehatan, DP2KBP3A dan Kepolisian. Sudah mulai berjalan per Januari 2023

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI
	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja) yakni melibatkan remaja, remaja dilatih menjadi konselor yang mana sebagai teman konseling bagi remaja-remaja lainnya. Dari ini PIK-R dapat digunakan untuk edukasi terkait pencegahan perkawinan anak dari remaja ke remaja lain. Khusus PIK-R sebenarnya sudah ada di sekolah-sekolah terutama tingkat SMA
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Jumlah Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Jumlah Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
		Pemenuhan Hak Anak	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	adanya data jumlah pemenuhan kebutuhan anak
			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI
		Pengarusutamaan Gender Dan pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Adanya Sosialisasi Pengarusutamaan Gender terkait mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, upaya menepis perspektif peran perempuan dalam rumah tangga
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
		Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI
		Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembentukan PUSPAGA. Lembaga ini untuk pelayanan meningkatkan kehidupan keluarga, melalui pendidikan pengasuhan keterampilan untuk menjadi orang tua, keterampilan mendidik anak dan kemampuan konseling bagi anak. Edukasi kepada keluarga agar tidak mudah menikahkan anak.
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Terhadap Keluarga
		Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi UU Perlindungan Anak dan Sosialisasi Perda Perlindungan Anak terbaru yang telah direvisi kepada pihak lingkup perangkat daerah dan masyarakat
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) : adanya sosialisasi/edukasi kepada kepala keluarga atau orangtua terkait regulasi minimal usia menikah dan parenting (pola asuh orangtua). Dalam hal ini ada tujuan untuk bekerjasama dengan DPMPDes yang mana mendorong desa dengan anggaran ADD untuk mengadakan sosialisasi tersebut kepada kepala keluarga di desa-desa
		Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya advokasi kebijakan dan perlindungan layanan bagi perempuan korban kekerasan
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota
	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar; Anak Terlantar; Lanjut Usia Terlantar; serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota. Terkait upaya pencegahan perkawinan anak, bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dapat diberikan kepada anak terlantar serta petugas PMKS yang bertugas di setiap kecamatan dapat mensosialisasikan upaya pencegahan perkawinan anak pada anak-anak terlantar
	Forum Anak Melawi			Sosialisasi Dan Kampanye Isu Pencegahan Perkawinan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pemahaman terhadap orang tua terkait dampak perkawinan anak 2. Menguatkan peraturan usia minimal menikah 3. Melaksanakan bimbingan atau sosialisasi terhadap remaja terkait perkawinan usia anak di sekolah maupun desa-desa 4. Peningkatan pengetahuan dan edukasi tentang bahaya seks bebas sehingga terjadi penurunan perkawinan anak dan stunting.

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI
	Gabungan Organisasi Wanita (GOW)			Sosialisasi Dan Kampanye Isu Pencegahan Perkawinan Anak	GOW akan ada program kerja untuk pencegahan stunting dengan materi praktek pembuatan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), yang juga nantinya akan diselingi dengan sosialisasi pencegahan perkawinan anak.
	Kantor Kementerian Agama			Pembinaan Remaja Usia Sekolah	Bimbingan terhadap anak sekolah terkait perkawinan anak dibawah umur. Edukasi terkait pencegahan perkawinan anak dan regulasi minimal usia menikah. Pada tahun 2024 rencananya program ini akan dilaksanakan dengan sasarannya yakni siswa-siswi tingkat SLTP. target 500 siswa SLTA per tahun
	Keuskupan Gereja Katolik			Sosialisasi Dan Kampanye Isu Pencegahan Perkawinan Anak	Keuskupan Gereja Katolik Melawi akan mendorong UMK/Kelompok Pemuda Gereja untuk mensosialisasikan isu pencegahan perkawinan anak
	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)			Sosialisasi Dan Kampanye Isu Pencegahan Perkawinan Anak	PKK dalam setiap program kerjanya akan menyisipkan sosialisasi pencegahan perkawinan anak dan berkolaborasi dengan DP2KBP3A
	Wahana Visi Indonesia			Sosialisasi Dan Kampanye Isu Pencegahan Perkawinan Anak	WVI siap bekerjasama dalam mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak dan berkolaborasi dengan forum anak
SAMBAS	Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)			Dukungan program yang berkorelasi terhadap 24 indikator pada 5 klaster kabupaten layak anak	Dukungan program yang berkorelasi terhadap 24 indikator pada 5 klaster kabupaten layak anak

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI
	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Monev (penguatan Dan Implementasi)	Penyampaian capaian kinerja oleh OPD terkait setiap triwulan dan akhir tahun	Penyampaian capaian kinerja oleh OPD terkait setiap triwulan dan akhir tahun	Penyampaian capaian kinerja oleh OPD terkait setiap triwulan dan akhir tahun
	Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda			Penguatan Kapasitas Keluarga	Penguatan kapasitas kepada PUSPAGA
				Seribu Da'i	Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas melalui Bidang Kesra Setda Kabupaten Sambas, memiliki program 1.000 Dai yang menasar ke sekolah-sekolah.
	Dinas Kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif/ preventif tingkat daerah kabupaten/ kota	PUSKESMAS	Pelayanan terpadu di PUSKESMAS
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Personal (UKP) kewenangan kabupaten/kota	Unit KIA-KB	Tersedianya unit KIA-KB di Puskesmas
		Posyandu Remaja	Pembinaan terpadu Kampung Keluarga Berkualitas (KB)	Pembinaan terpadu Kampung Keluarga Berkualitas (KB)	Pembinaan kampung keluarga berkualitas yang sudah terbentuk dengan melibatkan posyandu remaja
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Monev (penguatan Dan Implementasi)	MONEV terhadap perjanjian kerjasama (MoU) yang sudah ada	MONEV terhadap perjanjian kerjasama (MoU) yang sudah ada	MONEV terhadap perjanjian kerjasama (MoU) yang sudah ada
			Pertemuan rutin lintas sektor (gugus tugas KLA) oleh DP3AP2KB	Pertemuan rutin lintas sektor (gugus tugas KLA) oleh DP3AP2KB	Pertemuan rutin lintas sektor (gugus tugas KLA) oleh DP3AP2KB

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI
		Pembentukan Kelompok Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung Keluarga Berkualitas (KB)	Kampung Keluarga Berkualitas (KB)	Penambahan jumlah Kampung KB di Kabupaten Sambas
			Pembentukan kelompok ketahanan kesejahteraan Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	Peningkatan Kapasitas PIK-R
			Pembinaan terpadu Kampung Keluarga Berkualitas (KB)	Pembinaan terpadu Kampung Keluarga Berkualitas (KB)	Pembinaan kampung keluarga berkualitas yang sudah terbentuk
			Promosi dan konseling kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok	Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	Sosialisasi mengenai PIK-R dan peningkatan kapasitas kader PIK-R
		Pemenuhan Hak Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi pengembangan sekolah layak anak dan deklarasi dan pembentukan sekolah ramah anak
				Penyajian data mengenai perkawinan berdasarkan usia (dibawah 19 tahun)	Adanya integrasi data mengenai perkawinan berdasarkan usia dibawah 19 tahun

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI
				Perdes Perlindungan Anak Berbasis Adat	Adanya PERDES mengenai pencegahan perkawinan anak. Tahun 2022 telah dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh kepala desa mengenai penyusunan PERDES pencegahan perkawinan anak. Tahun 2023 akan ada pelatihan lanjutan mengenai rancangan isi dari PERDES pencegahan perkawinan anak.
				Program CEPAK (Cegah Perkawinan Anak)	Penyuluhan kepada kader PKK Se-Kabupaten Sambas mengenai PPA, stunting, KESPRO dan lain-lain dengan melibatkan dinas terkait untuk menjadi penyuluh/pemateri
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Membangun/memperkuat Jaringan Kerja	Satuan pendidikan non formal untuk anak usia muda yang putus sekolah	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Sosialisasi dan memaksimalkan keberadaan satuan pendidikan non formal dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan
Peningkatan kapasitas penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan			Peningkatan kapasitas lembaga desa (RT,RW, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan POSYANDU)	Peningkatan kapasitas lembaga desa (RT,RW, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan POSYANDU)	
Rehabilitasi Sosial		Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Pemberian informasi mengenai akses ke layanan pendidik dan kesehatan dasar, seperti fasilitasi pembuatan Kartu Identitas Anak	

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI
	Kantor Kementerian Agama			Penyajian data pernikahan lintas agama	Adanya integrasi data mengenai perkawinan berdasarkan agama selain Islam
SINTANG	Aisyiah			Pembinaan pada anak-anak panti asuhan	melalui panti asuhan yang dikelola, juga memberikan pendidikan seks untuk pencegahan perkawinan anak sejak dini
	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Memperkuat BKR yang ditujukan bagi keluarga yang memiliki anak remaja
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Jumlah Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, P3KS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Persentase Jumlah Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, P3KS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Pemenuhan Hak Anak			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI
		Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kab/Kota	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah lembaga pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG
		Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang bdisediakan
		Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan
		Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	pengembangan KIE anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	jumlah kegiatan KIE yang dilakukan
		Perlindungan Perempuan	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan
	Dinas Kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Penyadartahuan masyarakat tentang bahaya/ resiko perkawinan anak

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI
		Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pendidikan seks terhadap anak
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Penyadartahuan masyarakat tentang bahaya/ resiko perkawinan anak
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Mendorong adanya Peraturan Desa (Perdes) tentang Larangan Tidak Boleh Menikah di Usia Dini yang berisikan sanksi/denda
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Memperkuat pendidikan seks sejak dini kedalam muatan lokal
				Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
				Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
	Dinas Sosial			FGD Tingkat Desa (APBN)	materi FGD memuat kampanye PPA
	Forum Anak			Live Education	Melalui instagram melakukan kampanye pencegahan perkawinan anak
				Peringatan Hari Anak Nasional	Melakukan roadshow ke sekolah-sekolah melakukan kampanye pencegahan perkawinan anak
Gerakan Indonesia Anti Narkotika			Penyuluhan	memuat materi tentang PPA dalam kampanye anti narkoba	

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI	
	Ikatan Dokter Indonesia (IDI)			Nota Kesepahaman tentang keterangan kesehatan jiwa calon pengantin	Merumuskan pentingnya rekomendasi kesehatan jiwa calon pengantin usia dini sebagai syarat pemberian dispensasi (bekerjasama dengan Pengadilan Agama)	
				Penyuluhan	Penyuluhan ttg PPA ke remaja-remaja di sekolah	
				Poli Kesehatan Pelayanan Remaja	Konsultasi dan deteksi penyakit seksual utk remaja	
	Kementerian Agama			Bimbingan Pernikahan	Penyuluhan terhadap remaja yang masih sekolah (bekerjasama dengan pihak sekolah)	
	Keuskupan Gereja Katolik			Larangan di tiap gereja untuk menikahkan anak dibawah umur	berlaku untuk tiap gereja katolik	
	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)			Pembinaan Anak dan Remaja	bekerjasama dan DKBP3A	
	Pengadilan Agama				Mediasi	Memberikan informasi terhadap calon pengantin usia dini terhadap resiko perkawinan bawah umur
					Nota Kesepahaman dengan Dinas Kesehatan	Syarat keterangan kesehatan reproduksi calon pengantin dibawah umur sebagai syarat untuk memberikan dispensasi perkawinan
					Nota Kesepahaman tentang keterangan kesehatan jiwa calon pengantin	Merumuskan pentingnya rekomendasi kesehatan jiwa calon pengantin usia dini sebagai syarat pemberian dispensasi (bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, IBI, dan IDI)

LOKUS	AKTOR	PROGRAM*	KEGIATAN*	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI AKSI
KABUPAT EN	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil di kabupaten Kota	Bentuk kegiatan ini adalah sosialisasi terkait dengan pencatatan sipil oleh Dukcapil Kabupaten/Kota. Namun sosialisasi ini dapat dimuat terkait dengan dorongan oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Masyarakat untuk dapat mendata dan melaporkan pernikahan masyarakat di masing-masing desa dengan klasifikasi umur. Namun, mengingat hal ini merupakan ranahnya DPMPD, maka Dukcapil juga akan berkoordinasi dengan DPMPD. Dalam sosialisasi ini juga bisa mengundang DPPA dan Kemenag, Pengadilan Negeri, dan Tokoh Masyarakat.
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan pengelolaan informasi adminduk provinsi	Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan.	Dukcapil dapat membangun kerjasama dengan lintas stakeholder untuk pemanfaatan data. Termasuk membangun kerjasama terkait dengan pencatatan perkawinan.
	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Pemenuhan Hak Anak	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan provinsi	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak dan pendampingan, pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi	DP3A dapat melakukan intervensi terhadap kabupaten/kota pada program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendataan pernikahan anak sebagai syarat KLA.
		Pengelolaan Sistem Gender Dan Anak	Pengumpulan pengolahan dan analisis, penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat daerah provinsi	Penyediaan data gender dan anak provinsi	DPPA Provinsi melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan DPPA di tingkat Kabupaten/Kota terkait dengan pendataan perkawinan anak (bidang gender dan anak)

**) pada program dan kegiatan yang kosong (tidak terisi) mengindikasikan bahwa kegiatan tersebut tidak secara eksplisit tercantum pada rencana kerja dan renstra rencana strategis perangkat daerah.*

BAB 6.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan agar aksi yang telah dirumuskan berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan monitoring dan evaluasi melibatkan seluruh pihak yang telah berkomitmen untuk melakukan pencegahan perkawinan anak di Kalimantan Barat.

Dalam pelaksanaannya, diperlukan satuan tugas yang dikoordinir oleh DP3A Provinsi Kalimantan Barat, dengan beberapa ketentuan, yaitu:

1. Koordinasi dimasing-masing lokasi (kabupaten dan provinsi) dikoordinir oleh Perangkat Daerah urusan Perempuan dan Anak dimasing-masing tempat berlangsungnya aksi.
2. Pelaksanaan monev dilakukan dengan cara Penilaian Diri Sukarela (voluntary self assesment) dengan menggunakan format yang telah ditentukan.
3. Pusat Data Terintegrasi Tentang Perkawinan Anak dijadikan acuan untuk mengukur dampak (outcome) yang dihasilkan dari aksi pencegahan perkawinan anak.
4. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota tempat aksi dilangsungkan dan ditembuskan kepada DP3A Provinsi Kalimantan Barat.
5. DP3A Provinsi Kalimantan Barat mengompilasi hasil monitoring dan evaluasi ditingkat kabupaten dan provinsi, untuk selanjutnya disampaikan ke Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB 7.

Penutup

Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Kalimantan Barat merupakan aksi strategis multipihak dalam mengatasi tingginya angka perkawinan anak di Kalimantan Barat. Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan aksi pencegahan perkawinan anak tidak hanya dilakukan pada tingkat pemerintah daerah, namun juga pihak-pihak diluar lembaga pemerintahan yang juga memiliki komitmen dalam menurunkan angka perkawinan anak di Kalimantan Barat.

Dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak, tidak hanya sebagai pedoman dari masing-masing pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana aksi ini, namun diharapkan sebagai rujukan dari pihak lainnya. Aksi Pencegahan Perkawinan Anak dari para pihak unsur pemerintah daerah tertuang pada rencana kerja dan rencana strategis dari masing-masing perangkat daerah. Sedangkan, aksi dari para pihak non pemerintahan bersifat kesukarelaan (voluntary).

Diharapkan melalui rencana aksi yang sinergis dan sistematis mampu menurunkan angka perkawinan anak di Kalimantan Barat secara signifikan. Jika dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada rencana aksi ini, maka akan dilakukan penyempurnaan pada penyusunan selanjutnya.

